KOTA PEKANBARU

Edisi Maret 2026

Kencana

Kolaborasi Membangun Kota



H Agung Nugroho SE MM

LEBIH POPULER DIPANGGIL AGUNG KENCANA

H Markarius Anwar ST MArch

TERBIASA HIDUP MANDIRI SEJAK KULIAH



Inovatif dan Melayani

MEMIMPIN dengan ide dan inovasi, atau sering disebut sebagai kepemimpinan inovasi, adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada menginspirasi anggota tim untuk menghasilkan ide-ide kreatif, mendorong eksperimen, dan beradaptasi dengan perubahan.

Pemimpin inovatif tidak hanya sekadar memerintah, melainkan membangun budaya dimana kreativitas tumbuh subur dan gagasan baru diimplementasikan menjadi solusi bernilai tambah Membangun kota dengan inovasi berfokus pada transformasi digital dan tata kelola cerdas (smart city) untuk meningkatkan efisiensi, pelayanan publik, dan kualitas hidup.

Pendekatan ini mencakup inovasi pada pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan penguatan ekonomi kreatif melalui kolaborasi berbagai pihak (pemerintah, komunitas, akademisi, bisnis)

Pengembangan kota kreatif merupakan salah satu strategi untuk mencapai arahan Presiden untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Kota kreatif berperan untuk mendukung ekosistem kondusif dalam pengembangan ekonomi kreatif. Untuk itu, pengembangan Kota Pekanbaru haruslah dilakukan secara bersama-sama dan sinergi oleh lintas pemangku kepentingan.

Yakni melibatkan pemerintah baik pusat maupun daerah, komunitas kreatif sebagai representasi masyarakat, akademisi dan para pelaku usaha.

Setiap kota memiliki potensi dan masalah unik, serta membutuhkan solusi yang tepat guna, satu hal yang dapat menyokong masalah itu adalah pembangunan kota kreatif, lalu yang disebut kota berbasis ekonomi kreatif itu yang seperti apa?

Inovasi adalah langkah awal untuk meningkatkan nilai pada kota tersebut dan memastikan generasi mendatang tidak kehabisan sumber daya.

Di Kota Pekanbaru sendiri, khususnya di bawah masa kepemimpinan H Agung Nugroho dan H Markarius Anwar mewajibkan setiap SKPD memiliki inovasi.

Tujuannya agar peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat menjadi lebih baik, lebih modern, lebih mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Atas inovasi-inovasi yang dilakukan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho selama dalam setahun ini telah menerima berbagai penghargaan. Di antaranya:

- Tokoh Akselerator Tata Kelola Kota Berbasis Lingkungan (Detikcom Awards 2025): Penghargaan ini diberikan pada November 2025 karena Agung Nugroho dinilai berhasil membawa Kota Pekanbaru maju dan menggagas program lingkungan.
- Tokoh Inspiratif Penyiaran (KPID Riau): Diterima pada November 2025 atas inspirasi dan kontribusinya dalam dunia penyiaran di Riau.
- Pemimpin Muda Kolaboratif dan Inspiratif (KNPI Pekanbaru): Penghargaan yang diterima pada Agustus 2025 ini menyoroti kesuksesan dalam membangun sinergi antara pemerintah kota, pemuda, dan berbagai pihak.
- Kepala Daerah Pertama Implementasi SKB (2025): Penghargaan atas keberhasilan implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) di wilayahnya.

Membangun kota adalah tantangan kompleks yang melibatkan manajemen infrastruktur, tata ruang, dan kebutuhan warga secara seimbang.

Dalam simulasi maupun realitas, hal ini memerlukan perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan solusi atas kepadatan penduduk, kemacetan, serta dampak lingkungan untuk menciptakan kota yang layak huni.

Inovasi merupakan bekal untuk membangun kota di era yang terus berubah dengan cepat dan dinamis. Namun tanpa tindakan kolektif, segala upaya pembangunan kota akan sukar terlaksana. Ini adalah tugas bagi semua yang terlibat dalam perencanaan kota, semua warga kota, untuk bahu membahu memberi kontribusi bersama. ***

REDAKSI

Dewan Redaksi

H. AGUNG NUGROHO, S.E, M.M
(Walikota Pekanbaru)

Drs. INGOT AHMAD HUTASUHUT
(Pj. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru)

Dr. Tr. H. ZULHELMI ARIFIN, S.STP, M.Si
(Plh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekanbaru)

Pimpinan Umum

ARDIANSYAH EKA PUTRA, S.STP., M.SI
(Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Wakil Pimpinan Umum

T. AZNOM ZAIFANI, M.E
(Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Pimpinan Redaksi

T. AZNOM ZAIFANI, M.E
(Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Wakil Pimpinan Redaksi

VERDHIRA DINANTI, S.I.Kom
(Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Koordinator Liputan

RAHMILIA MIRNA GEMALA, S.T
(Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Sekretaris Redaksi

ADIL TRISEMA, S.Kom
(Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

Advokasi

H. EDI SUSANTO, S.H
(Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru)

Fotografer

AMRI

ARSIL MAJID

RAFID SYUHADA
(Peliput pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru)

EDISI MARET 2026



14-15
Wujud Nyata Program Green City Pemko Pekanbaru
Tukar Sampah dengan Uang Elektronik



40-41
Pekanbaru Bebas Sampah Bukan Sekadar Impian
LPS Ujung Tombak Atasi Sampah



44-45
Gebrakan Baru Wali Kota Pekanbaru Parkir Gratis di Ritel Modern
Berdayakan Jukir Melalui Lapak UMKM



56-57
Pemko Pekanbaru Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Fasilitasi Petani KUR Tanpa Bunga





H Agung Nugroho SE MM

Walikota Pekanbaru

Lebih Populer Dipanggil Agung Kencana



AGUNG Nugroho dilahirkan di Kota Padang, Sumatera Barat pada 14 Oktober 1984. Agung dikenal memiliki sikap egaliter dan memiliki pergaulan luas yang turut membentuk karier politiknya saat ini.

Hal ini tak terlepas dari perjalanan hidupnya yang berpindah-pindah kota seiring penugasan ayahnya yang seorang tentara.

Berdarah Jawa dari kedua orangtuanya, Agung berinteraksi dengan banyak budaya dan karakter suku, karena tumbuh besar di Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Sebelum akhirnya menetap di Pekanbaru, Agung dan keluarganya pernah tinggal di Padang, Indragiri Hilir, Batam dan Dumai.

Darah tentara dari sang ayah, menjadikan Agung pemberani dan sedikit rebel yang kerap disematkan untuk anak kolong.

Keberanian yang tinggi membuat Agung hobi balapan motor dan akhirnya menjadi pembalap motor profesional di era awal tahun 2000-an.

Dulunya ia lebih populer dipanggil Agung Kencana, nama Kencana di belakang namanya adalah club motor tempatnya bernaung 'Kencana Motor' Bangkinang.

Karier Agung bersama club Kencana Motor Bangkinang cukup moncer di balapan road race. Beberapa kali Agung menjuarai event road race tingkat Nasional.

Kecintaan akan dunia otomotif yang membuat Agung dipercaya memimpin Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Riau selama tiga periode.

Agung pernah memimpin KNPI Kota Pekanbaru. Di KNPI, Agung pun bertemu dengan pujaan hati yang saat ini menjadi isterinya yang saat itu sebagai ketua Kabupaten Indragiri Hilir.

Agung pun resmi menikah dengan seorang yang ia kenal dalam satu organisasi yaitu Sulastri dan dikarunia dua orang anak. Keduanya pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 dengan partai yang berbeda yaitu Partai Demokrat dan Golkar.

Selain menjabat sebagai wali kota Pekanbaru periode 2025-2030 , saat ini Agung menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau periode 2021-2026. Agung pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Riau sisa masa jabatan periode 2020-2024 dan terpilih untuk kedua kalinya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2024-2029.

Ia kemudian maju sebagai calon wali kota Pekanbaru dan harus mundur dari kursi anggota DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika memasuki pendidikan tinggi, ketertarikan Agung terhadap dunia politik mulai muncul. Agung mulai terlibat dalam gerakan mahasiswa saat berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau (UIR).



Suami dari senator Partai Demokrat, Sulastri itu membuat sejumlah gebrakan selama menjabat ketua KNPI Kota Pekanbaru.

Bermodal pengalaman memimpin sejumlah organisasi, perjalanan politiknya dimulai dari jenjang lokal. Agung memantapkan hati bergabung dengan Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tak butuh adaptasi lama, Agung memberanikan diri maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pekanbaru.

Hebatnya Agung terpilih sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru dalam Musyawarah Cabang, 7 April 2018 di Pekanbaru. Calon yang dikalahkan Agung adalah Firdaus, ketua DPC Partai Demokrat sebelumnya.

Banyak yang memprediksi Firdaus bakal menang mudah saat itu. Karena Firdaus merupakan wali kota Pekanbaru dan calon gubernur Riau.

Karier politiknya terus menanjak, di usia yang masih muda ketika terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Demokrat periode 2019-2024.

Setelah duduk menjadi anggota DPRD Riau, ia pun didapuk menjadi Wakil Ketua DPRD Riau.

Naik kelas, kemudian Agung Nugroho terpilih secara aklamasi menjadi calon tunggal ketua DPD Partai Demokrat Riau periode 2021-2026 dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-V pada 30 November 2021 di Pekanbaru. *

BIO FILE WALI KOTA

Nama: Agung Nugroho SE MM
Tempat/tgl lahir: Padang, 14 Oktober 1984
Istri : Sulastri

Riwayat Pendidikan
- SD Negeri 009 Tembilahan (1990–1994)
- SD Negeri 017 Batam (1991–1994)
- SD Negeri 001 Belakang Padang, Batam (1994–1995)
- SD Negeri 012 Buluh Kasap, Dumai (1995–1996)
- SMP Negeri Karanganyar, Dumai (1996–1997)
- SMP Negeri 22 Pekanbaru (1997–1999)
- SMA Negeri 2 Pekanbaru (1999–2002)
- S-1 Manajemen, Universitas Islam Riau (2003–2008)
- S-2 Manajemen, Universitas Lancang Kuning (2021–2022)

Karier Politik
- Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau (2020–2024)
- Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau
- Wali Kota Pekanbaru (2025–2030)









H Markarius Anwar ST MArch
Wakil Wali Kota Pekanbaru

Terbiasa Hidup Mandiri Sejak Kuliah

LAHIR dari keluarga petani dan guru, Markarius Anwar ST MArch ditempa menjadi pribadi tangguh dan memiliki tekad kuat.

Sejak mahasiswa ia dikenal sebagai sosok yang berprestasi dan aktif berorganisasi. Markarius Anwar dikenal sebagai politisi yang konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat Riau.

Kepercayaan masyarakat tersebut terbukti dengan perolehan suara yang terus melonjak signifikan pada setiap pemilu, sejak dari DPRD Kabupaten Pelalawan hingga DPRD Provinsi Riau selama dua periode.

Pria kelahiran Pangian, 18 Maret 1977 merupakan anak ke-7 dari tujuh bersaudara, dari pasangan Anwar Hakim dan Syamsinar.

Sang ayah merupakan petani sekaligus guru Sekolah Dasar, sementara ibu adalah seorang petani sekaligus Ibu Rumah Tangga.

Markarius Anwar memulai pendidikan formalnya di SDN Pangian (1983-1989), melanjutkan ke SMPN Buo (1989-1992), kemudian SMAN 1 Lintau (1992-1995). Di masa-masa sekolah ini, Markarius mulai menempa jiwa kepemimpinannya dengan menjadi Ketua Osis di SMP dan SMA, serta aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler sekolah.

Setelah tamat SMA, Markarius melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik Universitas Bung Hatta (tamat tahun 2000). Selama kuliah, ia dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi dan aktif berorganisasi.

Dari sini jiwa kepemimpinan dan sosialnya semakin terbentuk. Mulai dipercaya sebagai Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kerohanian Universitas, Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Teknik, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan, hingga ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumbar.

Turun ke jalan menyuarakan aspirasi masyarakat merupakan 'DNA' Markarius Anwar muda. Saat kuliah, Markarius adalah sosok yang mandiri. Ia kerap memperoleh beasiswa dan memiliki hasil usaha. Sehingga tidak bergantung kepada orangtua. Setelah menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dengan gelar Master of Architecture (MArch) di bidang Urban Design, Pak Eka semakin mantap dalam dunia konsultan.

Ia terlibat dalam berbagai proyek strategis yang membentuk wajah perkotaan di beberapa wilayah Riau.

Markarius Anwar memulai karir politik ketika terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan periode 2009-2014 dari Partai PKS.

Semenjak itu karir politiknya terus menanjak. Berbekal kepercayaan masyarakat yang tinggi, pada Pemilu 2014 Markarius terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Riau periode 2014–2019.



Kemudian pada Pemilu 2019 kembali terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Riau dengan perolehan suara meningkat tiga kali lipat dari periode sebelumnya.

Ia peraih suara terbanyak ketiga di Dapil Siak-Pelalawan, dan peraih suara terbanyak pertama khusus Kabupaten Siak. Hal tersebut karena masyarakat sangat merasakan perjuangan Markarius Anwar merealisasikan aspirasi.

Kepiawaiannya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, membuat Markarius Anwar menjadi sosok pribadi hangat dan dekat dengan berbagai kalangan masyarakat dan pejabat daerah. Bagi Markarius, politik bukanlah soal kekuasaan, tetapi sarana pengabdian yang lebih luas. Ia melihat posisinya sebagai wakil rakyat sebagai ladang amal untuk memberikan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Perjuangannya mengawal hak-hak masyarakat selama menjadi legislator sudah banyak dirasakan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, hingga perikanan.

Satu yang teranyar dan kekinian adalah perjuangan mengawal pembangunan Jalan Lintas Pekanbaru–Perawang via PT SIR sebagai jalur transportasi yang memperpendek jarak tempuh Pekanbaru menuju Siak sebagai wilayah Dapilnya.

Markarius juga memiliki perhatian besar terhadap pengembangan potensi generasi muda, pelajar dan mahasiswa. Sebagian aspirasi pembangunannya dialokasikan untuk program Pelatihan Wirausaha Muda, Pelatihan Digital Marketing hingga Festival Kesenian.

Markarius sering diundang sebagai pembicara pada seminar dan Focus Group Discussion (FGD) mahasiswa. Selain itu, Markarius mengadakan pelatihan di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menghidupkan usaha emak-emak dan masyarakat.

Pada Pilkada Kota Pekanbaru 2024, H Markarius Anwar didaulat oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Pekanbaru mendampingi H Agung Nugroho SE MM.

Dalam kampanye politiknya, Markarius kerap menekankan bahwa jabatan publik adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan sekadar sarana mencari kekuasaan.

Setiap langkah politik yang ia ambil adalah manifestasi dari ibadah kepada Allah SWT. Jabatan itu hanyalah alat, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan jabatan tersebut untuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak. *



BIO FILE WAKIL WALI KOTA

Nama : Markarius Anwar ST MArch
Tempat/tgl Lahir: Pangian, 18 Maret 1977
Istri : dr Sari Rahmawati SpOG

Riwayat Pendidikan
SDN Pangian (1983-1989)
SMPN Buo (1989-1992)
SMAN 1 Lintau (1992-1995)
S1 Universitas Bung Hatta (1995-2000)
S2 Universitas Teknologi Malaysia (2004-2007)

RIWAYAT PEKERJAAN
Dosen Universitas Lancang Kuning (2007-2009)
Anggota DPRD Pelalawan (2009-2014)
Anggota DPRD Provinsi Riau (2014-2019)
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau (2019-2023)





BERBINCANG - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM berbincang dengan seorang warga yang menunggu layanan kesehatan di puskesmas.

Wali Kota Maksimalkan Layanan Kesehatan Masyarakat

Puskesmas Buka Hingga Malam

TEROBOSAN baru dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru di awal tahun 2026. Seluruh puskesmas yang ada di Kota Bertuah resmi membuka layanan hingga malam hari.

Sebanyak 21 puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Pekanbaru akan melayani masyarakat dari pukul 07.00 hingga 21.00 WIB.

Kebijakan tersebut diluncurkan Wali Kota H Agung Nugroho SE MM dalam kegiatan launching penambahan jam layanan puskesmas di Puskesmas Sidomulyo. Menurut Wali Kota Agung, program ini menjadi bagian dari komitmen Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Sejak 2 Januari 2026, seluruh puskesmas di Pekanbaru buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Pelayanan Puskesmas tidak perlu diragukan lagi," kata Agung.

Penambahan jam operasional ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan pada malam hari.

Dengan kebijakan ini, warga tidak lagi harus bergantung pada klinik atau fasilitas kesehatan swasta ketika membutuhkan pengobatan di luar jam kerja.

"Perpanjangan jam layanan ini bentuk menjawab kebutuhan masyarakat di Pekanbaru. Banyak yang ingin berobat saat malam hari, namun sebelumnya karena puskesmas hanya buka sampai sore maka masyarakat pindah ke klinik terdekat," tuturnya.

Masyarakat dapat melaporkan jika ada puskesmas yang menutup pelayanan sebelum pukul 21.00 WIB. Bahkan pihaknya menjamin ketersediaan dokter dan perawat ada, sehingga masyarakat tak perlu khawatir.

"Satu catatan saja, tidak boleh ada satupun masyarakat Pekanbaru yang sakit datang berobat ditolak Puskesmas, ataupun rumah sakit di Pekanbaru. Silahkan laporkan ke saya," tegas Agung.

Pemko Pekanbaru, lanjut Agung, memastikan bahwa fasilitas kesehatan milik pemerintah terus berbenah agar lebih baik lagi. Hal ini guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berobat ke fasilitas kesehatan yang tersedia.

Wako telah menegaskan ke jajarannya agar tak ada satupun masyarakat Pekanbaru yang tak bisa berobat di puskesmas. "Kita akan buat layanan puskesmas maksimal," imbuhnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fendriyanto menyampaikan, masyarakat kini dapat mengakses layanan kesehatan di 21 puskesmas mencakup dokter umum, farmasi, serta pelayanan gawat darurat.

Hazli menegaskan perpanjangan jam layanan merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Wali Kota Pekanbaru. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut telah diuji coba pada November 2025, namun baru diterapkan di delapan puskesmas.

"Sekarang kami pastikan perpanjangan jam layanan sudah berlangsung di seluruh puskesmas," ungkapnya. Menurut Hazli, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama bagi warga yang tidak sempat berobat pada jam kerja normal.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga telah menjalin kerja sama dengan 31 rumah sakit di Kota Pekanbaru. Kerja sama tersebut dilakukan untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal atau SPM di bidang kesehatan. Dengan perpanjangan jam layanan ini, Pemko Pekanbaru berharap masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat, merata, dan mudah diakses hingga malam hari. *



LAYANAN KESEHATAN - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM melihat langsung aktivitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh staf puskesmas.



HINGGA MALAM - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM meresmikan jam layanan puskesmas hingga malam hari di Puskesmas Sidomulyo.



SIDAK - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM inspeksi mendadak atau sidak satu puskesmas setelah diterapkan penambahan jam layanan kesehatan.



FOTO - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM foto bersama staf dan tenaga kesehatan Puskesmas Simpang Baru.



ZERO STUNTING - Wali Kota H Agung Nugroho SE MM menegaskan komitmen status zero stunting di Kota Bertuah.

Gandeng Swasta Jadi Bapak Asuh

Wali Kota Targetkan Pekanbaru Zero Stunting

WALI KOTA Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM menetapkan target ambisius bagi Kota Bertuah untuk mencapai status zero stunting atau bebas kasus tengkes dalam waktu dekat.

Komitmen ini disampaikan sebagai kelanjutan dari keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru yang mencatatkan prestasi gemilang sepanjang tahun 2025.

Data menunjukkan, Pemko Pekanbaru sejauh ini berhasil menangani lebih dari 3.000 kasus stunting melalui berbagai intervensi gizi yang terintegrasi. Dalam pernyataannya Wali Kota Agung Nugroho menegaskan, upaya penurunan angka stunting tetap menjadi prioritas utama meskipun daerah sedang menghadapi tantangan fiskal.

Ia menyebutkan, pencapaian tahun lalu menjadi modal kuat untuk mempercepat eliminasi kasus gangguan pertumbuhan pada anak di Pekanbaru.

"Kita targetkan Pekanbaru bisa zero stunting. Ini adalah misi kemanusiaan untuk menyiapkan generasi masa depan yang tangguh," ujarnya. Guna mencapai target tersebut, wali kota menekankan pentingnya strategi kolaborasi, terutama dengan dunia usaha dan sektor swasta. Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, transfer dana dari Pemerintah Pusat ke kas daerah Pekanbaru tahun ini mengalami pengurangan cukup signifikan, yakni sebesar Rp 400 miliar.

Keterbatasan anggaran tersebut tidak menyurutkan langkah Pemko Pekanbaru. Sebagai solusinya, dibentuk Badan Stunting Pekanbaru yang mengedepankan pola kerja sama bapak angkat atau bapak asuh anak stunting.

Oleh karena itu, camat dan lurah diharapkan bisa merangkul pengusaha yang ada di wilayah masing-masing untuk mengakomodasi program CSR dan diarahkan penanganan stunting.

Melalui skema ini, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pekanbaru diajak berkontribusi langsung dalam pembiayaan asupan gizi anak-anak yang terindikasi stunting sekitar wilayah operasional.

Mekanisme kerja program ini didasarkan pada data yang akurat dan berjenjang. Dinas Kesehatan Pekanbaru bekerjasama camat, lurah, hingga ketua RT/RW dan kader posyandu untuk melakukan pendataan detail mengenai anak-anak yang berisiko maupun yang sudah



BALITA - Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Hj Sulastri menggendong seorang balita di posyandu sebagai langkah penanggulangan stunting sedari dini.

terdampak.

Data by name by address ini kemudian diserahkan kepada badan usaha mitra untuk memudahkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

Secara teknis, Agung menjelaskan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengintervensi satu anak stunting adalah sebesar Rp1.200.000 per bulan.

Masa intervensi intensif ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan berturut-turut untuk memastikan adanya perubahan signifikan pada berat dan tinggi badan anak. Dana tersebut nantinya tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada orangtua, melainkan dikelola oleh tim pelaksana di lapangan.

Kader posyandu memegang peranan kunci dalam pengelolaan dana dari perusahaan mitra tersebut. Para kader akan bertanggung jawab menyusun menu harian, memasak, hingga mendistribusikan makanan bergizi langsung kepada anak-anak penerima manfaat.

Pola kerja sama ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh sektor swasta benar-benar dikonsumsi oleh anak dan tidak disalahgunakan untuk kebutuhan lain.

Wali kota berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha ini dapat menjadi percontohan nasional dalam penanganan stunting secara swadaya.



POSYANDU - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM bersama Ketua TP PKK meresmikan Posyandu Pucuk Wangi sebagai satu ujung tombak penanganan stunting.



MAKANAN BERGIZI - Wakil Wali Kota Pekanbaru H Markarius Anwar ST MArch menyalurkan bantuan makanan bergizi dari PT Angkasa Pura II.

Dengan gotong royong, ia optimistis target Pekanbaru bebas stunting dapat segera terwujud demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Bumi Lancang Kuning.

"Tugas kita adalah memastikan setiap anak di Pekanbaru tumbuh sehat tanpa kekurangan gizi," imbuhnya. *



BANTUAN - Ketua TP PKK Hj Sulastri dan Ketua 1 TP PKK Kota Pekanbaru dr Hj Sari Rahmawati SpOG mengunjungi keluarga anak stunting sekaligus menyerahkan bantuan.



RENOVASI HALTE - Halte bus TMP di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya simpang Jalan Cempedak, rampung diperbaiki Pemko Pekanbaru bersama BSI.

Halte TMP Lebih Nyaman dan Menarik

Pemko Pekanbaru Bangun Fasilitas Publik Tanpa APBD

SEJUMLAH halte bus Trans Metro Pekanbaru atau TMP tampil dengan wajah baru. Peremajaan dilakukan, sehingga fasilitas publik itu kini tampak lebih modern dan nyaman digunakan masyarakat.

Menariknya, semua dilakukan tanpa menggunakan APBD Kota Pekanbaru. Renovasi tersebut hasil kolaborasi Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak swasta.

Beberapa halte yang rampung diperbaiki di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya simpang Jalan Cempedak, serta Jalan Arifin Ahmad. Keduanya kini berdiri dengan desain kekinian yang menjadi daya tarik baru di jalur protokol kota.

Terbaru, halte bus TMP depan gudang Bulog Jalan Jenderal Sudirman sudah direnovasi. Halte tersebut tampil dengan wajah baru yang lebih estetik dan nyaman bagi calon penumpang.

Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM mengungkapkan, transformasi halte TMP merupakan hasil nyata dari upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaring kolaborasi dengan sektor swasta.

"Kerja sama ini merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun fasilitas publik yang lebih baik. Kita sangat terbuka bagi pihak swasta yang ingin berkontribusi," ujarnya.

Langkah menggaet pihak swasta menjadi strategi Pemko Pekanbaru untuk mempercepat pemulihan fasilitas publik yang mengalami kerusakan.

Mengingat sejumlah halte Bus TMP saat ini dalam kondisi memprihatinkan, kerja sama semacam ini dinilai sangat efektif untuk efisiensi anggaran daerah.

Ia menjelaskan, selain Bank Syariah Indonesia membantu perbaikan 10 halte, beberapa perusahaan lain menyatakan komitmen, seperti PT Angkasa Pura, PT Awal Bross, Indosat IM3, dan pusat oleh-oleh Viera.

"Total halte kita ada 66 unit. Untuk tahap awal, kita fokuskan di ruas-ruas utama seperti Sudirman dan Arifin Ahmad. Konsepnya bertahap tapi berkelanjutan," tambahnya.

Agung mengatakan, saat ini sudah terdapat sekitar 70 persen halte bus TMP yang selesai direnovasi tanpa APBD. "Sekarang itu sudah terbangun hampir 70 persen tanpa menggunakan APBD," sebutnya.

Ia menyampaikan, untuk renovasi halte bus TMP, Dinas Perhubungan sebelumnya mengusulkan anggaran sebesar Rp 17 miliar. Namun, atas dukungan dunia usaha, perbaikan halte bus TMP dapat dilakukan. Dukungan dari dunia usaha sangat diperlukan mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah kota untuk melaksanakan pembangunan. "Makanya kami mengajak pihak swasta berkolaborasi membangun Kota Pekanbaru," tuturnya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi mengatakan, hingga saat ini, beberapa halte bus TMP di ruas jalan protokol mulai diperbaiki melalui skema kerja sama.

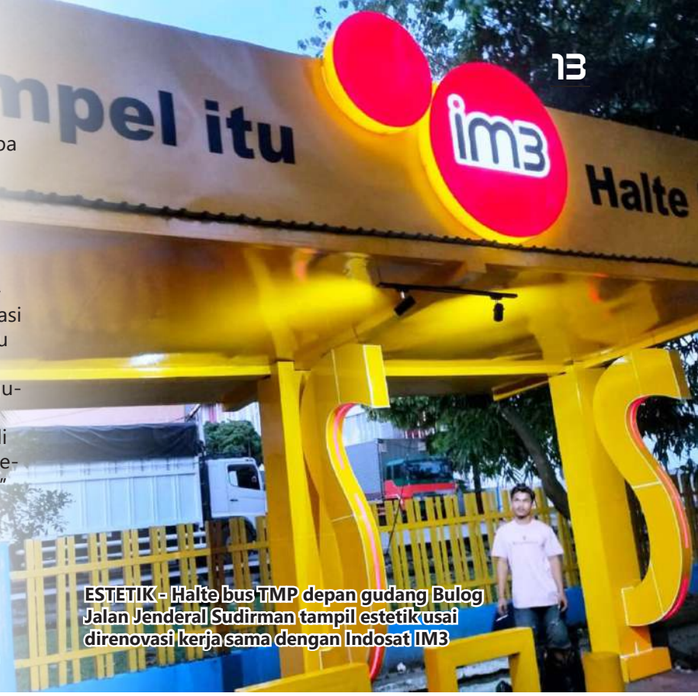
Titik-titik halte yang menjadi sasaran perbaikan tersebar di lokasi strategis guna menunjang mobilitas masyarakat.

Pihak swasta yang ingin bekerjasama terus bertambah. Teranyar, Bank BJB tertarik dan sepakat merenovasi dua halte di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tuanku Tambusai. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari kontribusi sektor swasta dalam mendukung pembangunan fasilitas umum.

"Bank BJB bersedia membantu renovasi dua halte di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tuanku Tambusai sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan," jelasnya.

Dengan rampungnya sejumlah renovasi halte TMP, Masykur berharap fasilitas pendukung transportasi massal di Pekanbaru semakin baik.

Kehadiran halte yang lebih modern dan bersih diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk kembali menggunakan layanan bus TMP dalam aktivitas sehari-hari. *



ESTETIK - Halte bus TMP depan gudang Bulog Jalan Jenderal Sudirman tampil estetik usai direnovasi kerja sama dengan Indosat IM3



RENCANA PEMBENAHAN - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM menjelaskan rencana pembenahan sejumlah halte kepada perwakilan Bank BJB.



ANGKASA PURA - Wakil Wali Kota Pekanbaru H Markarius Anwar ST MArch menerima bantuan renovasi halte TMP dari GM PT Angkasa Pura Bandara SSKII.



MOU BJB - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM menandatangani nota kerja sama dengan pihak Bank BJB terkait renovasi dua halte bus TMP.



TUKAR SAMPAH - Waste Station yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk masyarakat menukar sampah dengan uang elektronik.

Wujud Nyata Program Green City Pemko Pekanbaru

Tukar Sampah dengan Uang Elektronik

PEMERINTAH Kota Pekanbaru mengambil langkah revolusioner dalam menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan besar di wilayah perkotaan.

Melalui pengoperasian stasiun pengumpulan dan pemilahan sampah atau Waste Station, masyarakat kini didorong untuk tidak sekadar membuang limbah, melainkan mengelolanya menjadi sumber penghasilan tambahan dalam bentuk uang elektronik.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menyebutkan, terdapat 10 titik strategis yang disiapkan sebagai pusat penukaran. Program ini dirancang dengan sistem digital guna memastikan transparansi dan kemudahan bagi warga yang ingin berpartisipasi dalam menjaga kebersihan kota.

"Warga cukup pilah sampah di rumah, bawa ke Waste Station dan nilainya masuk ke saldo aplikasi," ujar Agung Nugroho.

Langkah inovatif ini merupakan bagian dari visi besar mewujudkan Pekanbaru sebagai Green City atau kota hijau. Dengan melibatkan perusahaan teknologi pengelolaan sampah Rekosistem, pemerintah berupaya mengurangi beban volume sampah di tempat pembuangan akhir sekaligus meningkatkan kesadaran ekologis di tingkat rumah tangga.

Adapun sebaran 10 titik lokasi Waste Station ini mencakup area publik dan pusat keramaian, di antaranya RTH Kaca Mayang, Wisata Alam Mayang, TRC Pekanbaru AMAN 112, Stadion Utama Riau, Taman MPP, dan area perkantoran MPP.

Selain itu, fasilitas ini juga tersedia di seberang Polda Riau, STC, Pasar Panam, hingga Simpang 4 Rumbai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra menjelaskan, operasional fasilitas ini akan dimulai secara bertahap.

Target terdekat adalah memastikan layanan ini sudah bisa dinikmati masyarakat sebelum memasuki masa libur Hari Raya Idul Fitri.



KOTA HIJAU - Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar komitmen mewujudkan kota hijau atau green city.

"Insya Allah sebelum lebaran ini satu Waste Station sudah bisa beroperasi. Masyarakat bisa menukarkan sampah di sana," kata Reza.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini diwajibkan mengunduh aplikasi Rekosistem terlebih dahulu untuk proses administrasi dan pemantauan saldo.

Berbagai jenis limbah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi dapat diterima, mulai dari botol plastik, kaca, kertas atau kardus, logam, minyak jelantah, hingga sampah elektronik bekas yang selama ini sulit dikelola.

"Jadi masyarakat datang bawa sampah ditimbang, berat sampah akan mendapatkan poin. Poin itu kalau sudah banyak baru ditukar menjadi uang elektronik atau saldo ke aplikasinya," ungkap Reza.

Upaya ini dipandang sebagai sudut pandang baru dalam pelayanan publik, di mana pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai pengangkut sampah, tetapi sebagai fasilitator ekonomi sirkular.

Dengan adanya insentif berupa uang, diharapkan pola pikir masyarakat berubah dari sekadar membuang menjadi memilah, sehingga dampak lingkungan yang dihasilkan dapat ditekan secara signifikan.

Wakil Walikota Markarius Anwar mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung program Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan konsep Pekanbaru Green City.

Ia menegaskan, program kota bersih dan ramah lingkungan membutuhkan partisipasi aktif seluruh warga. "Sekarang kita sudah menjalankan program Pekanbaru bersih, Green City. Tentu ini harus didukung masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, satu bentuk dukungan paling sederhana adalah tidak membuang sampah sembarangan. Ia menegaskan, kebiasaan tersebut dapat menghambat terwujudnya kota yang bersih dan berkelanjutan.

"Kalau masyarakat masih membuang sampah sembarangan, tentu program Green City tidak akan tercapai," sebutnya.



GORO ASN - Pemko Pekanbaru menerapkan kewajiban gotong royong (goro) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebelum jam kerja.

Wawako menyampaikan, Pemerintah Kota Pekanbaru tergabung sekaligus menjadi ketua dalam kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Dalam forum tersebut, terdapat tiga fokus program yang dijalankan, yakni di bidang lingkungan hidup, transportasi, dan edukasi sekolah.

Di sektor lingkungan hidup, pemko melibatkan partisipasi warga melalui pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih teratur.

Sementara di bidang transportasi, pada 2026 Pemko akan mengoperasikan 16 unit bus listrik dengan sistem Buy The Service (BTS).

Adapun pada sektor pendidikan, Pemko telah menjalankan program Green School dengan mendorong sekolah melakukan penghijauan, termasuk penanaman tanaman obat dan buah-buahan.

"Dengan menggalakkan penghijauan di sekolah, maka lingkungan kita akan lebih asri, nyaman dan aman," tutupnya. *



SOFT LAUNCHING - Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho melakukan soft launching Waste Station di RTH Tunjuk Ajar Integritas.



ROMPI - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM melakukan pemasangan rompi kepada ASN yang akan bertugas dalam program Satu ASN Satu RW.



ANDA PENGENAL - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM memasangkan kartu tanda pengenal program inovatif Satu ASN Satu RW.



SALAM KOMANDO - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM salam komando dengan perwakilan ASN program Satu ASN Satu RW.

Program Inovatif Wali Kota Satu ASN Satu RW

Pastikan Penerima Bantuan Tepat Sasaran

SATU lagi program inovatif diusung Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka mempercepat pembangunan Kota Bertuah.

Program bertajuk "Satu ASN Satu RW" telah resmi diluncurkan sebagai upaya memperpendek jarak birokrasi dan memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM meluncurkan program ini dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan Binawidya di halaman kantor kecamatan setempat.

Program strategis ini dirancang untuk memastikan setiap rukun warga atau RW memiliki pendamping dari unsur pemerintah guna mengawal kualitas pelayanan publik secara langsung.

Selain itu, program ini juga difokuskan sebagai instrumen validasi data lapangan, sehingga kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di masa mendatang dapat lebih tepat sasaran dan berbasis pada realitas terkini.

Pada tahap awal pelaksanaan, Pemko Pekanbaru menetapkan dua wilayah sebagai proyek percontohan atau pilot project, yakni Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Sail.

Dalam menjalankan tugas, para petugas di lapangan akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik guna



TUJUAN PROGRAM - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM menjelaskan tujuan program inovatif Satu ASN Satu RW.

memastikan metodologi pendataan memenuhi standar teknis yang akurat dan kredibel.

Wali Kota Agung Nugroho menekankan bahwa urgensi utama dari program ini adalah pembenahan akurasi data penerima bantuan sosial.

Berdasarkan laporan yang diterima, ia menengarai masih banyak ditemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat di lapangan, baik bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Banyak laporan masuk bahwa program seperti Program Keluarga Harapan dari pusat masih menyasar warga yang tidak lagi berhak. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat. Melalui ASN turun ke RW, kita akan lakukan pembaruan data secara total agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan," ungkap Agung.

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Syamsuwir menjelaskan, pada tahap awal terdapat 67 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu ditugaskan dalam program ini di Kecamatan Binawidya dan Sail.

"Di Kecamatan Binawidya ada 49 orang, sedangkan di Kecamatan Sail ada 18 orang," ujar Syamsuwir.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPPK paruh waktu akan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah, berkoordinasi dengan RT dan RW setempat guna memastikan data yang dikumpulkan akurat, faktual, dan mutakhir.

"Data yang dikumpulkan akan diinput ke dalam sistem informasi data kewilayahan. Data ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik ke depan," terangnya.

Ia menambahkan, program satu ASN satu RW merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho, dalam rangka memperkuat pelayanan publik hingga ke tingkat paling bawah.

Program Satu ASN Satu RW dinilai sebagai langkah progresif Pemko Pekanbaru dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data atau data-driven governance. Melalui pendekatan mikro di tingkat RW, pemerintah diharapkan mampu mendeteksi persoalan sosial sejak dini, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dengan implementasi program ini, Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmen mewujudkan birokrasi adaptif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Sekaligus memastikan bahwa setiap anggaran negara benar-benar sampai kepada warga yang berhak menerima. *



FOTO BERSAMA - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM foto bersama di halaman Kantor Camat Binawidya.

Program Zero Putus Sekolah
Pemko Pekanbaru

Ribuan Anak Kembali Sekolah



KEMBALI SEKOLAH - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM memperkenalkan Raziq yang kembali bersekolah.



RESMIKAN SMP - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM meresmikan tiga gedung SMP negeri baru mendukung program Zero Putus Sekolah.

KOMITMEN Pemerintah Kota Pekanbaru menghadirkan hak pendidikan kepada masyarakatnya sukses terlaksana. Melalui program Zero Putus Sekolah, ribuan anak Pekanbaru kembali dapat merajut asa, balik ke jenjang pendidikan sesuai tingkatan masing-masing.

Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM memastikan tidak lagi anak-anak yang putus sekolah di Kota Pekanbaru. Karena pemko sudah menjaring dan menyekolahkan kembali bagi anak putus sekolah.

"Alhamdulillah zero anak putus sekolah sudah kita selesaikan. Tidak ada lagi anak-anak Pekanbaru yang tidak sekolah," kata Agung Nugroho.

Menurutnya, penjaringan anak putus sekolah ini sudah dilakukan selama beberapa bulan. Pemko memberdayakan para kader Posyandu di kelurahan untuk melakukan pendataan di wilayah masing-masing.

Total ada 1.700 anak yang terdata putus sekolah. Mereka putus sekolah ada yang terkendala biaya, hingga penahanan ijazah akibat tunggakan pendidikan yang tidak diselesaikan.

Pemko kembali menyekolahkan anak-anak tersebut mulai untuk tingkatan, SD, SMP, hingga SMA. Ada juga yang melanjutkan untuk mengambil program sekolah paket A, B dan C.

"Kalau masih ada anak putus sekolah, laporkan kepada kami. Asalkan anak tersebut betul-betul mau sekolah akan kita bantu," terang Agung. Wali kota memaparkan, program Zero Putus Sekolah merupakan komitmen nyata Pemko Pekanbaru untuk membiayai pendidikan anak-anak yang selama ini tidak mengenyam pendidikan formal akibat berbagai keterbatasan, baik ekonomi, sosial, maupun administratif.

Menurut wako, program ini bukan sekadar kebijakan formal. Tetapi merupakan gerakan sosial massal yang menuntut keterlibatan langsung seluruh elemen masyarakat. Khususnya kader posyandu yang memiliki kedekatan dan penguasaan terhadap kondisi warga di lingkungan masing-masing.

"Kenapa kami menggunakan kader posyandu sebagai garda terdepan kami dalam menampung dan mencari anak-anak yang putus sekolah, karena kami tidak mau hanya diserahkan data-data saja oleh Dinas Pendidikan," ujar Agung.

Wako menegaskan, pendekatan langsung dari rumah ke rumah jauh lebih efektif dalam menemukan kasus anak putus sekolah yang selama ini tidak terdata secara formal. Oleh karena itu, pendataan dilakukan tidak melalui instansi teknis semata, melainkan melalui pendekatan komunitas dan sosial berbasis lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, program ini menyasar anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama yang tidak lagi bersekolah dan belum pernah mengakses pendidikan formal akibat kondisi ekonomi atau keterbatasan dokumen administrasi.

Kemudian anak-anak yang mengalami hambatan psikososial, seperti tekanan keluarga atau keterlambatan perkembangan. Anak yang disasar berasal dari keluarga rentan, termasuk anak yatim, piatu, atau yatim piatu yang tidak memiliki penanggung jawab pendidikan.

Wako Agung menekankan pentingnya validitas data dan kesungguhan dalam proses pelacakan. Ia tidak ingin data yang dikumpulkan hanya menjadi angka administratif yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ke depan, Pemerintah Kota Pekanbaru akan terus menabuh genderang perang terhadap angka putus sekolah. Komitmennya tetap sama, memastikan seluruh anak di Kota Bertuah mendapatkan akses pendidikan layak melalui program sekolah gratis secara masif.

> **"Pendidikan adalah hak dasar. Kendala biaya atau ijazah tertahan tidak boleh lagi menjadi tembok penghalang masa depan anak-anak kita.**
>
> **AGUNG NUGROHO.**
> Wali Kota Pekanbaru



BERBINCANG - Wali Kota H Agung Nugroho SE MM berbincang dengan seorang anak yang sempat putus sekolah di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Wako Agung menegaskan bahwa program penjaringan anak putus sekolah bukan sekadar agenda rutin, melainkan misi prioritas untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas.

Ia berharap Pekanbaru dapat menjadi kota percontohan dalam penanganan masalah pendidikan di tingkat nasional.

"Pendidikan adalah hak dasar. Kendala biaya atau ijazah tertahan tidak boleh lagi menjadi tembok penghalang masa depan anak-anak kita," imbuhnya. *



PERLENGKAPAN SEKOLAH - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa di Sialang Rampai.



BERSAMA ANAK - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM foto bersama anak-anak sekolah di Kelurahan Melebung.

Libatkan Swasta Bangun Kota



LEBIH ESTETIK - Ini gambaran disain pembangunan bundaran di depan Mall Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman, yang akan lebih tertata dan estetik.

Strategi Inovatif dan Cerdas Wali Kota Pekanbaru

KOTA Pekanbaru kini kembali menjadi perhatian Nasional. Agenda pembangunan infrastruktur di Kota Bertuah terus menggeliat dengan skema yang inovatif dan cerdas.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota H Agung Nugroho SE MM, pembangunan fisik kota tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, melainkan melalui penguatan kemitraan dengan sektor swasta.

Strategi mengakselerasi pembangunan ini diambil mengingat posisi strategis Pekanbaru sebagai ibu kota sekaligus barometer kemajuan di Provinsi Riau.

Wako Agung menegaskan, untuk mencapai standar kota modern yang representatif, diperlukan percepatan yang tidak mungkin dilakukan jika hanya mengandalkan keterbatasan kas daerah yang ada saat ini.

Kalau semua pembangunan mengandalkan APBD, tentu prosesnya tidak akan mungkin bisa secepat kilat. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kunci utama untuk melakukan lompatan besar.

"Pekanbaru ini barometer Provinsi Riau. Kalau semua mengandalkan APBD, tentu pembangunan tidak akan bisa secepat yang kita harapkan," ujar Agung.

Maka dari itu, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi langkah strategis demi mendorong kemajuan kota. Menurut Agung, konsep membangun kota dengan melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan



LIBATKAN SWASTA - Wali Kota H Agung Nugroho SE MM melibatkan pihak swasta manajemen Mall Pekanbaru terkait rencana penataan U-Turn di Jalan Jenderal Sudirman.



IKON KOTA - Begini disain pembangunan persimpangan Jalan Arifin Ahmad-Jalan Jenderal Sudirman yang diproyeksikan menjadi ikon baru Kota Pekanbaru.

adalah wujud rasa memiliki terhadap Pekanbaru sebagai rumah bersama.

"Membangun Pekanbaru bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Pekanbaru ini kota kita bersama. Jadi memang harus saling berbagi dan berkontribusi," tambahnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru secara terbuka memberikan ruang bagi dunia usaha untuk ikut berkontribusi nyata dalam mempercantik ruang publik.

Satu bukti nyata dari sinergi ini adalah renovasi besar-besaran puluhan halte Trans Metro Pekanbaru yang tersebar di berbagai ruas protokol.

Melalui dukungan dari berbagai perusahaan, Pemko Pekanbaru berhasil mencatatkan penghematan anggaran daerah hingga angka miliaran rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk perawatan fasilitas transportasi tersebut.

Sejumlah institusi besar tercatat aktif mengambil bagian dalam proyek ini, di antaranya Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia, Viera, Insyira, hingga Rumah Sakit Awal Bros.

Partisipasi dari sektor perbankan dan kesehatan ini dinilai memberikan dampak langsung pada kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik setiap harinya.

Tak hanya sektor transportasi, pembangunan ikon kota di persimpangan Jalan Arifin Ahmad-Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya depan Purna MTQ.

Pembangunan taman tersebut direalisasikan oleh Rumah Sakit Awal Bros sebagai kontribusi terhadap penataan ruang kota.

Sebagai catatan, nilai investasi untuk semua itu bahkan menyentuh angka Rp4 miliar, sebuah nominal yang cukup besar jika harus dikeluarkan dari pos belanja daerah. Proyek lain yang segera direalisasikan dengan mengadopsi pola serupa adalah pembangunan bundaran di depan Mall Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman.

Seluruh pembiayaan proyek ini didukung oleh pihak Mall Pekanbaru sebagai bentuk kolaborasi swasta dalam penataan kota.

Wali kota mengatakan, pembangunan bundaran tersebut sudah dalam tahap persiapan dan akan segera dikerjakan. "Bundaran MP ini dibantu oleh pihak Mall Pekanbaru. Anggarannya cukup mahal hampir Rp3 miliar," ucapnya.

Kawasan di lokasi tersebut akan ditata ulang agar lebih representatif. Fasilitas putar balik atau U-turn yang ada saat ini akan dibangun kembali dengan desain yang lebih tertata dan estetis.

Bundaran MP nantinya mengusung konsep budaya Melayu dan dilengkapi dengan air mancur serta area swafoto untuk masyarakat.

"Dengan pola kolaborasi ini, kita optimis wajah Pekanbaru akan semakin modern dan kompetitif sebagai ibu kota provinsi. Kita ingin pembangunan tetap masif namun tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan," sebut wako. *



TINJAU PROYEK - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM meninjau proyek ikon kota di persimpangan Jalan Arifin Ahmad-Jalan Jenderal Sudirman.



BUNDARAN MP - Wali Kota H Agung Nugroho SE MM melakukan peninjauan kawasan bundaran depan Mall Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman.

Bersihkan Sampah Visual di Jalanan



INSTRUKSI WAKO - Wali Kota Agung Nugroho menginstruksikan tim yustisi saat meninjau penertiban reklame dan baliho.

Wali Kota Tertibkan Baliho dan Reklame Sesuai Arahan Presiden RI

PENERTIBAN baliho dan reklame merupakan agenda prioritas Wali Kota H Agung Nugroho SE MM sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Saat itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada para kepala daerah agar serius menata ruang kota, termasuk menertibkan reklame ilegal dan tak berizin. Sejak awal 2025, ratusan tiang reklame dipotong tim yustisi Pemko Pekanbaru. Kebijakan ini berlanjut sepanjang 2026 sebagai bagian dari penataan kota dan arahan Presiden RI untuk mengurangi "sampah visual" yang merusak estetika.

Wali Kota Agung meminta semua kepala dinas terkait membentuk tim khusus penertiban. Yakni terdiri Bapenda, Dishub, Satpol PP, DMPTSP, Dinas PU, Inspektorat dan Kabag Hukum.

Penertiban dan pemotongan ratusan baliho serta tiang reklame ilegal atau melanggar aturan dilakukan sepanjang tahun 2025-2026, khususnya di ruas jalan protokol seperti Jalan Jenderal Sudirman, Tuanku Tambusai, dan Soekarno-Hatta.

Langkah ini bertujuan menata wajah kota agar lebih rapi, nyaman, dan bebas dari gangguan visual.

Jalan protokol yang selama ini dipenuhi bando, baliho, dan reklame tak beraturan kini terlihat lebih lapang, rapi, dan indah.

Sejumlah titik strategis di jalan utama pun sudah terbebas dari baliho dan tiang reklame berukuran besar yang sebelumnya mengganggu pandangan.

Selama ini, keberadaan baliho dan reklame semerawut mendapat perhatian serius dari sejumlah pihak. Selain mengganggu estetika kota, kondisi tersebut juga dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan serta merusak wajah kota sebagai ibu kota Provinsi Riau.

Langkah cepat yang dilakukan Pemko Pekanbaru dalam penertiban spanduk dan reklame mencerminkan komitmen daerah menjadi kota yang responsif terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.

Tak hanya itu saja, Kota Pekanbaru dinilai telah menjadi "hutan reklame" atas keberadaan baliho dan reklame.

"Kami ingin Pekanbaru menjadi kota yang sigap dan sejalan dengan arah kebijakan Nasional. Arahan Bapak Presiden ini kami terjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan. Bahkan sudah kami kerjakan di Pekanbaru sejak awal dilantik," tegasnya.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menyampaikan, sepanjang tahun 2025 sebanyak 198 tiang billboard telah dipotong. Selain itu, sekitar 300 baliho juga ditertibkan karena dinilai melanggar aturan dan mengganggu keindahan kota.

"Penertiban ini bukan sekadar penegakan aturan. Billboard dan baliho yang semrawut adalah sampah visual yang mengganggu estetika kota. Karena itu kami tertibkan agar Pekanbaru menjadi lebih rapi, nyaman, dan enak dipandang," ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga bertujuan mendukung penataan ruang kota, termasuk penambahan ruang terbuka hijau serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha, ini berarti adaptasi ke cara promosi yang lebih tertib dan modern. Sebab billboard dan baliho yang tidak tertata dinilai mengurangi kenyamanan masyarakat. Penertiban billboard dan baliho inipun mendapat dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekanbaru, sehingga pelaksanaannya berjalan tertib dan kondusif. Prioritas utama pada jalan-jalan protokol dan sebagian besar dilaksanakan pada malam hari guna menghindari kemacetan lalu lintas.

Baliho dan reklame yang ditertibkan meliputi yang tidak memiliki izin, izinnya sudah kedaluwarsa, hingga reklame yang izinnya tidak lagi diperpanjang.



ALAT KHUSUS - Tim Pemko Pekanbaru menggunakan alat khusus dalam penertiban reklame dan baliho.



POTONG TIANG - Tim khusus Pemko Pekanbaru memotong tiang reklame yang tak berizin.

"Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan penertiban reklame akan terus dilanjutkan karena masih ditemukan billboard dan baliho yang melanggar aturan serta mengganggu ketertiban kota," imbuhnya.

Wali kota berharap masyarakat Kota Pekanbaru dapat ikut berkontribusi menjaga kebersihan dan ketertiban dan keindahan Kota Pekanbaru dengan tidak memasang spanduk dan baliho yang melanggar aturan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah menertibkan spanduk-spanduk iklan dengan ukuran besar di sepanjang jalan. Hal ini merupakan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Gerakan itu dikenalkan Prabowo dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Prabowo mengatakan spanduk iklan berukuran besar hampir selalu dilihatnya di daerah-daerah.

Prabowo meminta pemerintah daerah hingga pengusaha menertibkan spanduk iklan itu. Ia menyarankan agar spanduk iklan dibuat dengan tidak berlebihan. *



TERTIBKAN REKLAME - Tim Pemko Pekanbaru menertibkan reklame dan baliho yang merusak estetika.



Inovasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

Mobil AMAN Permudah Layanan Adminduk Warga



PERUBAHAN KTP - Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar melakukan perubahan data KTP melalui Mobil AMAN.

MOBIL AMAN merupakan sarana bagi pencetakan administrasi kependudukan (adminduk) keliling. Mobil AMAN merupakan singkatan dari Administrasi Kependudukan Mudah, Aman, dan Nyaman.

Ini menjadi solusi baru untuk mempermudah warga dalam mengurus dokumen kependudukan. Merupakan langkah cepat Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho setelah dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kemudahaan adminduk yang diberikan melalui Mobil AMAN seperti cetak e-KTP, KIA, PDF Kartu Keluarga (KK) dan PDF Akta Kelahiran, Perkawinan, Kematian dan cetak PDF Surat Pindah.

"Mobil AMAN adalah layanan yang memastikan proses adminduk selesai dengan mudah, aman, dan nyaman. Dulu hanya slogan kampanye. Kepala Disdukcapil Pekanbaru, Bu Irma cepat menerjemahkan inovasi sesuai keinginan kami," ujar Wali Kota Agung Nugroho SE MM saat memperkenalkan mobil AMAN di Jalan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya.

"Jadi bagi yang malas berurusan ke Kantor, Mobil AMAN ini yang mendatangi masyarakat, jadi lebih dekat berurusan. Semoga manfaatnya juga langsung dirasakan masyarakat," tambah Agung.

Wali kota juga terkena imbas pemekaran wilayah Kecamatan Tampan. Dimana sekarang dibagi menjadi dua kecamatan, yakni Binawidya dan Tuah Madani.

"Sampai sekarang KTP saya masih menggunakan data lama Kecamatan Tampan. Ini saking malasnya berurusan, jadi sekarang Mobil AMAN memudahkan adminstrasi masyarakat. pemko Pekanbaru hadir di tengah masyarakat. Warga tidak perlu lagi datang ke kantor lurah, camat dan MPP. Biar kami yang datang," papar Agung. Bahkan wali kota mencoba sendiri fasilitas dan manfaat Mobil AMAN. Sehingga sekarang data KTP sudah diperbarui dengan memanfaatkan fasilitas Mobil Aman. "Waktunya lebih kurang lima menit saja. Saya dari Tampan sekarang pindah ke Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya dampak pemekaran wilayah," sebutnya. Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan tiga unit mobil AMAN tambahan. Mobil ini akan berkeliling melayani apa yang diinginkan masyarakat dalam urusan adminduk.

"Targetnya nanti bisa memenuhi keinginan masyarakat. InsyaAllah nanti kita harapkan bisa sampai 10 mobil," jelas Agung. Terkait rute, wali kota menyebut akan diatur oleh camat dan lurah masing-masing. Mobil ini akan datang ke satu titik di kelurahan untuk memberikan layanan.

Beberapa manfaat Mobil AMAN bagi Warga Pekanbaru antara lain bisa menghemat waktu dan biaya. Karena warga tidak perlu antre di Disdukcapil.

Akses lebih mudah karena Mobil AMAN mendatangi kecamatan/kelurahan. Meningkatkan inklusi karena membantu warga yang kesulitan transportasi atau tinggal jauh dari pusat kota serta pelayanan yang transparan dan nyaman.

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan



KADISDUKCAPIL - Kepala Disdukcapil Irma Novrita memberikan sambutan saat peluncuran Mobil AMAN.



MOBIL AMAN - Warga akan mendapatkan kemudahan urusan adminduk melalui Mobil AMAN (Administrasi Kependudukan Mudah, Aman, dan Nyaman).



DILUNCURKAN - Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar meluncurkan Mobil AMAN di Kecamatan Bukitraya.

Sipil atau Disdukcapil Kota Pekanbaru masih memprioritaskan layanan mobil AMAN di kecamatan pinggiran.

Kepala Disdukcapil Irma Novrita mengatakan, masih banyak warga pinggiran yang sulit untuk melakukan langsung pengurusan administrasi kependudukan langsung ke UPT atau kantor Disdukcapil.

"Kami minta kepada camat yang jauh jangkauannya, yang warganya memerlukan layanan mobil AMAN. Sebenarnya lewat online bisa juga cuma bisa saja mungkin mereka tidak punya handphone atau jaringan. Itu yang kita sasar pada umumnya daerah pinggiran atau daerah pemekaran," papar Irma. Sementara untuk kecamatan dalam kota menurut Irma pihaknya tidak menurunkan mobil AMAN, mengingat warganya bisa langsung datang ke MPP Dukcapil.

Sampai saat ini lanjut Irma, antusias masyarakat untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan melalui mobil AMAN juga cukup tinggi. Seperti untuk perekaman dan cetak KTP serta perbaikan elemen data.

"Kalau kita rata-rata ada sekitar 60 keping KTP dicetak setiap hari melalui mobil AMAN," ungkap Irma lagi. Irma menambahkan, layanan mobil AMAN dioperasikan setiap hari. Dimana untuk layanan Senin- Jumat langsung ke kecamatan sedangkan layanan Sabtu- Minggu di keramaian yang menyasar perekaman untuk anak umur 16 tahun.*





REKAM DATA - Wali Kota Agung Nugroho merekam data kependudukan melalui Mobil AMAN.

Inovasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

Mobil AMAN Permudah Layanan Adminduk Warga



PERUBAHAN KTP - Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar melakukan perubahan data KTP melalui Mobil AMAN.

MOBIL AMAN merupakan sarana bagi pencetakan administrasi kependudukan (adminduk) keliling. Mobil AMAN merupakan singkatan dari Administrasi Kependudukan Mudah, Aman, dan Nyaman.

Ini menjadi solusi baru untuk mempermudah warga dalam mengurus dokumen kependudukan. Merupakan langkah cepat Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho setelah dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kemudahaan adminduk yang diberikan melalui Mobil AMAN seperti cetak e-KTP, KIA, PDF Kartu Keluarga (KK) dan PDF Akta Kelahiran, Perkawinan, Kematian dan cetak PDF Surat Pindah.

"Mobil AMAN adalah layanan yang memastikan proses adminduk selesai dengan mudah, aman, dan nyaman. Dulu hanya slogan kampanye. Kepala Disdukcapil Pekanbaru, Bu Irma cepat menerjemahkan inovasi sesuai keinginan kami," ujar Wali Kota Agung Nugroho SE MM saat memperkenalkan mobil AMAN di Jalan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya.

"Jadi bagi yang malas berurusan ke Kantor, Mobil AMAN ini yang mendatangi masyarakat, jadi lebih dekat berurusan. Semoga manfaatnya juga langsung dirasakan masyarakat," tambah Agung.

Wali kota juga terkena imbas pemekaran wilayah Kecamatan Tampan. Dimana sekarang dibagi menjadi dua kecamatan, yakni Binawidya dan Tuah Madani.

"Sampai sekarang KTP saya masih menggunakan data lama Kecamatan Tampan. Ini saking malasnya berurusan, jadi sekarang Mobil AMAN memudahkan adminstrasi masyarakat. pemko Pekanbaru hadir di tengah masyarakat. Warga tidak perlu lagi datang ke kantor lurah, camat dan MPP. Biar kami yang datang," papar Agung. Bahkan wali kota mencoba sendiri fasilitas dan manfaat Mobil AMAN. Sehingga sekarang data KTP sudah diperbarui dengan memanfaatkan fasilitas Mobil Aman. "Waktunya lebih kurang lima menit saja. Saya dari Tampan sekarang pindah ke Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya dampak pemekaran wilayah," sebutnya. Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan tiga unit mobil AMAN tambahan. Mobil ini akan berkeliling melayani apa yang diinginkan masyarakat dalam urusan adminduk.

"Targetnya nanti bisa memenuhi keinginan masyarakat. InsyaAllah nanti kita harapkan bisa sampai 10 mobil," jelas Agung. Terkait rute, wali kota menyebut akan diatur oleh camat dan lurah masing-masing. Mobil ini akan datang ke satu titik di kelurahan untuk memberikan layanan.

Beberapa manfaat Mobil AMAN bagi Warga Pekanbaru antara lain bisa menghemat waktu dan biaya. Karena warga tidak perlu antre di Disdukcapil.

Akses lebih mudah karena Mobil AMAN mendatangi kecamatan/kelurahan. Meningkatkan inklusi karena membantu warga yang kesulitan transportasi atau tinggal jauh dari pusat kota serta pelayanan yang transparan dan nyaman.

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan



KADISDUKCAPIL - Kepala Disdukcapil Irma Novrita memberikan sambutan saat peluncuran Mobil AMAN.



MOBIL AMAN - Warga akan mendapatkan kemudahan urusan adminduk melalui Mobil AMAN (Administrasi Kependudukan Mudah, Aman, dan Nyaman).



DILUNCURKAN - Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar meluncurkan Mobil AMAN di Kecamatan Bukitraya.

Sipil atau Disdukcapil Kota Pekanbaru masih memprioritaskan layanan mobil AMAN di kecamatan pinggiran.

Kepala Disdukcapil Irma Novrita mengatakan, masih banyak warga pinggiran yang sulit untuk melakukan langsung pengurusan administrasi kependudukan langsung ke UPT atau kantor Disdukcapil.

"Kami minta kepada camat yang jauh jangkauannya, yang warganya memerlukan layanan mobil AMAN. Sebenarnya lewat online bisa juga cuma bisa saja mungkin mereka tidak punya handphone atau jaringan. Itu yang kita sasar pada umumnya daerah pinggiran atau daerah pemekaran," papar Irma. Sementara untuk kecamatan dalam kota menurut Irma pihaknya tidak menurunkan mobil AMAN, mengingat warganya bisa langsung datang ke MPP Dukcapil.

Sampai saat ini lanjut Irma, antusias masyarakat untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan melalui mobil AMAN juga cukup tinggi. Seperti untuk perekaman dan cetak KTP serta perbaikan elemen data.

"Kalau kita rata-rata ada sekitar 60 keping KTP dicetak setiap hari melalui mobil AMAN," ungkap Irma lagi. Irma menambahkan, layanan mobil AMAN dioperasikan setiap hari. Dimana untuk layanan Senin- Jumat langsung ke kecamatan sedangkan layanan Sabtu- Minggu di keramaian yang menyasar perekaman untuk anak umur 16 tahun.*





REKAM DATA - Wali Kota Agung Nugroho merekam data kependudukan melalui Mobil AMAN.



EFISIENSI ANGGARAN - Di Bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar, Pemko Pekanbaru melakukan efisiensi anggaran.

Tuntaskan Warisan Tunda Bayar Pemko Pekanbaru

Agung-Markarius Berhasil Tertibkan Anggaran

SEJUMLAH Pekerjaan Rumah (PR) mesti diselesaikan Wali Wali Kota H Agung Nugroho SE MM dan Wakil Wali Kota H Markarius Anwar ST MArch usai dilantik sebagai pemimpin Kota Pekanbaru. Satu di antaranya menyelesaikan tunda bayar tahun 2023-2024 dengan total kewajiban awal Rp 467 miliar. Utang tersebut menjadi beban serius keuangan daerah dan kepercayaan mitra kerja pemerintah. Namun pada awal tahun 2026, semua utang tunda bayar dilunasi Pemko Pekanbaru secara bertahap.

"Ketika kami masuk, kami ditinggali utang tunda bayar sebesar Rp 467 miliar. Hari ini bisa kami sampaikan, utang tersebut sudah lunas," kata Wali Kota Agung Nugroho. Ia menjelaskan, hanya tersisa satu atau dua rekanan yang belum mengambil hak karena persoalan administrasi dan lamanya waktu penagihan, bahkan ada yang tertunda hingga lima tahun.

"Secara umum bisa dikatakan utang Rp 467 miliar tahun ini sudah lunas. Yakni melalui langkah efisiensi dan rasionalisasi anggaran secara cermat dan terukur," jelas Agung.

Melalui sinergi dengan DPRD Kota Pekanbaru dan seluruh pemangku kepentingan, utang tunda bayar tersebut akhirnya berhasil dilunasi. "Ini terwujud karena adanya fokus dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk DPRD," ujar Agung.

Kebijakan penertiban anggaran yang disiplin memberikan dampak terhadap kinerja keuangan daerah. Satu indikator paling nyata terlihat dari lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil melampaui target pada akhir tahun 2025.



MUSRENBANG - Wali Kota Agung Nugroho menghadiri kegiatan musrenbang untuk menampung aspirasi masyarakat.



"Realisasi PAD tercatat menembus angka lebih Rp 1,2 triliun. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa strategi pengelolaan keuangan yang disiplin mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah," ungkap Agung.

Perbaikan kondisi keuangan daerah juga berdampak langsung pada kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Jika sebelumnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hanya dapat dibayarkan selama 10 bulan, kini telah direalisasikan secara penuh hingga 14 bulan.

Agung menegaskan bahwa seluruh capaian ini merupakan hasil kerja kolektif, bukan prestasi satu pihak semata. "Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah," imbuhnya.

Atas capaian itu, Agung memuji kinerja seluruh kepala dinas hingga staf di Kota Pekanbaru. Khususnya dalam peningkatan PAD dan ikut dalam menata Pekanbaru lebih baik.

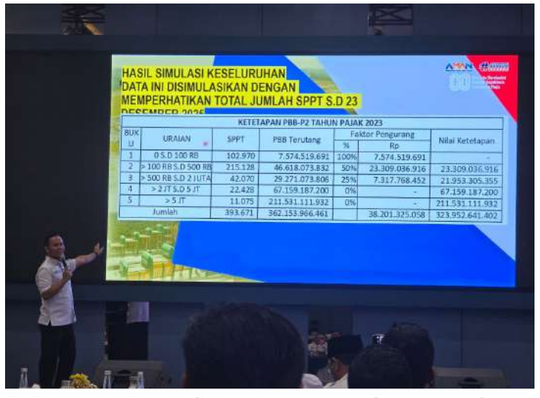
"Saya lihat teman-teman OPD komitmen bekerja bersama untuk masyarakat. Ini bukan kerja saja, ini kerja kami bersama Pak Wakil Wali Kota Markarius dan seluruh OPD," kata Agung.

Ketika menghadapi beban utang tunda bayar, persoalan keuangan lain juga dialami Pemko Pekanbaru. Yakni anggaran TKD dari pusat dipotong sekitar Rp 433 miliar lebih.

Namun sesuai komitmennya dari awal, Agung memastikan hal itu tidak akan berdampak pada tunda bayar, secara bertahap dilunasi.

Beberapa langkah strategis lain yang dilakukan Wako Agung menuntaskan tunda bayar yakni membatasi seluruh pegawai bepergian luar kota. Bahkan untuk pembatasan, izin pegawai wajib mendapat persetujuan langsung wali kota.

"Cara lain apa, caranya seluruh pegawai izin SPPD (surat perintah perjalanan dinas) baik eselon II, III, IV dan staf harus izin Wali Kota. Jadi agak berkurang yang berangkat, maka anggaran dapat digunakan untuk pelayanan ke masyarakat, bangun jalan, drainase," kata Agung.



TURUNKAN PBB - Wali Kota Agung Nugroho menurunkan tarif PBB untuk menggenjot PAD sektor pajak daerah.



JALAN MULUS - Sejumlah ruas jalan rusak di Kota Pekanbaru kembali mulus.

Selain itu, ada kebijakan menurunkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang semula naik 300 persen dikembalikan ke kebijakan awal. Akhirnya, masyarakat beramai-ramai mau membayar pajak.

"Tahun ini kita turunkan lagi PBB kembali seperti sebelumnya, ini juga akhirnya masyarakat mau bayar. Lalu pembangunan tercapai, PAD meningkat. Alasannya karena selama ini masyarakat belum terasa uangnya untuk apa, hari ini partisipasi masyarakat meningkat dan PAD meningkat," kata Agung.

Agung mengungkap tahun ini terdapat 42 KM jalan Pekanbaru mulus dari target awal hanya sekitar 20 KM. Selanjutnya sekitar 60 KM jalan dalam kota akan kembali dikerjakan Dinas PUPR Pekanbaru.

"Tahun ini 42 KM lebih jalan mulus, tahun depan target kita 60 KM. Ada juga drainase kita anggarkan Rp 100 miliar untuk drainase se-Pekanbaru," kata Agung lagi. Kebijakan Wako Agung yang cukup menarik adalah setelah APBD Perubahan Pekanbaru disahkan. Ia memilih fokus untuk menyelesaikan tunda bayar.

Pada Oktober tahun 2025 lalu, wali kota kembali menegaskan, penyelesaian tunda bayar jadi prioritas pemko pada tahun ini. Hingga saat ini, pemko telah melunasi lebih dari Rp 270 miliar dari total kewajiban.

"Sudah Rp 270 miliar lebih yang kami bayarkan. Jadi, tunda bayar tinggal sekitar Rp 197 miliar lagi yang masih menjadi beban Pemko Pekanbaru," ujar Agung.

Sisa tunda bayar akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Jika tidak sepenuhnya bisa dilunasi pada 2025, akan dialokasikan kembali dalam APBD 2026.

"Pelan-pelan kami selesaikan. Kalau tidak tuntas tahun ini karena keterbatasan pendapatan, maka akan kami lanjutkan pada tahun depan," tutur Agung.

Selain fokus menuntaskan kewajiban, Pemko Pekanbaru terus menggenjot pendapatan daerah. Supaya, target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. *

Kencana
Kolaborasi Membangun Kota



Program Wali Kota Tanpa APBD Pekanbaru

Seribu Titik WiFi Gratis di Ruang Publik

PROGRAM Seribu Wireless Fidelity (WiFi) gratis adalah langkah besar Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadikan kota lebih digital-friendly tanpa membebani APBD. Kehadiran program ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi serta mendukung aktivitas produktif warga Pekanbaru di berbagai lokasi strategis tanpa terbebani biaya kuota internet. Secara resmi program 1.000 WiFi gratis diluncurkan Wali Kota H Agung Nugroho SE MM pada awal Maret 2026. Peluncuran ditandai dengan MoU antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Penandatanganan MoU oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dengan Ketua BPW APJII Riau, Trio Gunawan di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Program 1.000 WiFi gratis dapat dinikmati masyarakat Kota Pekanbaru secara bertahap. Masyarakat bisa mengakses layanan ini di ruang publik.

Wali Kota Agung Nugroho menegaskan bahwa inovasi ini menjadi prestasi tersendiri karena dijalankan tanpa menyentuh APBD. Pemerintah kota memilih jalur kolaborasi dengan sektor swasta sebagai bentuk sinergi dalam membangun ekosistem kota cerdas (smart city) yang inklusif.

"Program ini murni tanpa APBD. Kami menggandeng pihak swasta untuk memberikan layanan WiFi gratis kepada masyarakat Pekanbaru sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kolaborasi membangun daerah," jelas Agung.

Wako menuturkan, APJII memasang WiFi gratis di 200 titik Kota Bertuah. Sementara untuk 800 titik lain, Pemko Pekanbaru akan terus memperluas kemitraan dengan menggandeng berbagai badan usaha yang memiliki komitmen serupa dalam pembangunan infrastruktur digital.

Ia menjelaskan, pemasangan WiFi gratis bertujuan mendukung pelayanan publik yang sebagian besar telah berbasis daring. Terutama di area yang sebelumnya sulit mendapatkan internet.

Disamping juga mendukung pendidikan dan UMKM dengan menyediakan koneksi gratis untuk belajar, bekerja, dan berjualan online serta mengurangi kesenjangan digital antara masyarakat mampu dan kurang mampu.



KERJA SAMA - Pemko Pekanbaru menjalin kerja sama dengan pihak APJII Riau dalam mewujudkan Program Wifi Gratis.

Target utama pemasangan WiFi gratis adalah sejumlah ruang publik. Seperti halte Bus Trans Metro Pekanbaru, Ruang Terbuka Hijau (RTH), masjid, dan posyandu. Satu titik WiFi dapat diakses hingga 500 pengguna secara simultan.

Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan online, termasuk mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dalam pelayanan publik.

Karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru mempercepat pemerataan jaringan internet gratis hingga lingkungan RT dan RW. Sebab program ini bukan sekadar menyediakan akses internet, tetapi untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat dan mendukung pelayanan publik. Untuk menjaga pemanfaatan tetap positif, pemko akan menerapkan sistem pengawasan dan penyaringan konten, termasuk membatasi akses terhadap judi online dan aktivitas digital negatif lain.

Terintegrasi Program Lapor Pak Camat

Pemko integrasikan layanan WiFi publik dengan program pengaduan "Lapor Pak Camat". Melalui program ini, masyarakat dapat langsung menyampaikan laporan dan aspirasi kepada pemerintah, mulai dari tingkat OPD hingga kecamatan dan kelurahan.

Nomor kontak pejabat terkait akan dibuka ke publik guna mempercepat respons terhadap aduan masyarakat. Selain itu, evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dengan percepatan ini, Pemko Pekanbaru menargetkan seluruh wilayah RT dan RW dapat menikmati akses internet gratis, sehingga masyarakat tidak lagi terkendala dalam mengakses informasi dan layanan digital.

Sementara itu, Ketua BPW APJII Riau, Trio Gunawan menyatakan mendukung penuh komitmen yang telah dibuat dalam menghadirkan layanan WiFi gratis.

"Kerja sama dengan pemko bagi kami untuk mendekatkan dengan masyarakat dengan memberikan layanan wifi gratis. Komitmen ini akan kita jalankan," bebernya.

Pemasangan dilakukan secara bertahap untuk memastikan pemerataan akses internet di lokasi-lokasi strategis di Kota Pekanbaru.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra menambahkan, WiFi gratis diperlukan untuk mendukung proses pendaftaran peserta didik baru yang dilaksanakan secara online, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan pelajar dan mahasiswa untuk menunjang kegiatan belajar. "Pemasangan WiFi gratis ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang produktif," kata Ardiansyah. Apalagi Pemko Pekanbaru akan segera mencanangkan program Sistem Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (Sipadu Aman). Melalui sistem ini, warga dapat mengurus berbagai dokumen administrasi di kelurahan dan kecamatan secara daring.



SERIBU LOKASI - Secara bertahap Wifi Gratis Pemko Pekanbaru menyasar hingga seribu lokasi ruang publik.

"Dengan Sipadu Aman, warga dapat mengajukan permohonan surat keterangan domisili dan dokumen administrasi lainnya cukup melalui gawai. Bahkan saat beraktivitas atau berdagang, warga tetap dapat mengakses layanan tersebut," tutupnya. *



TERINTEGRASI - Program Wifi Gratis Pemko Pekanbaru akan terintegrasi dengan pengaduan Lapor Pak Camat.



Wali Kota Pekanbaru Komitmen Majukan Olahraga

Hadirkan Sarana Olahraga di Tengah Warga



JALAN SEHAT - Wali Kota Pekanbaru turut meramaikan kegiatan jalan sehat Bersama masyarakat.

ERA kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM dan Wakil Walikota Markarius Anwar, kebijakan pembangunan Kota Pekanbaru tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan dan pendidikan termasuk pembangunan sarana olahraga.

Hal ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karena minat dan kepedulian masyarakat terhadap olahraga juga terus meningkat.

Langkah awal yang dilakukan Wali Kota Agung pada periode awal kepemimpinannya adalah terkait pengembangan dan pembangunan Sport Center di atas lahan seluas 12 hektare, di Kecamatan Kulim.

"Stadion sport center ini punya Kota Pekanbaru. Stadion mini untuk lokasinya di Jalan Palembang," ujarnya.

"Lapangan bola. Ada GOR Bulu Tangkis dan sudah ada juga bumi perkemahan, sepatu roda yang akan dilanjutkan lagi untuk kita bangun," sambung wako.

Masyarakat Kota Pekanbaru dan sekitar sebentar lagi akan memiliki ruang olahraga dan rekreasi yang representatif. Di lahan luas itu, sudah berdiri lapangan sepakbola berukuran 4,5 hektare. Disusul rencana pembangunan lapangan menembak 3,2 hektare, serta Bumi Perkemahan Pramuka seluas 1,5 hektare.

Tak hanya itu, beragam fasilitas olahraga lain juga disiapkan. Seperti lapangan takraw, badminton, basket, bola voli, hingga ruang terbuka hijau yang bisa menjadi tempat berkumpul warga.



HIDUP SEHAT - Wakil Wali Kota Markarius Anwar bermain bola bersama warga sebagai ajakan hidup sehat.



MINI SOCCER - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bermain sepakbola di lapangan Kencana Mini Soccer Jalan Melur, Sukajadi.

Pembangunan Sport Center diharapkan bisa menjadi solusi minimnya fasilitas olahraga di Pekanbaru. Ini juga yang menjadi alasan kuat mendorong wali kota untuk menghadirkan pusat kegiatan bagi masyarakat. kehadiran Sport Center tidak hanya menjanjikan lapangan luas atau gedung olahraga modern, melainkan juga ruang interaksi sosial yang sehat.

Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan pembangunan dilakukan bertahap, dengan harapan setiap sudut kawasan ini kelak benar-benar hidup dan bermanfaat.

Sedikitnya ada empat cabang olahraga yang bisa bermain di Sport Center Pekanbaru diantaranya Sepakbola, Menembak, Badminton dan Takraw.

Khusus lapangan sepakbola, lapangannya berstandar Internasional. Baik rumput, sirkulasi air dan sebagainya sudah berstandar Internasional. Ditargetkan Sport Center Pekanbaru dapat menjadi sarana untuk meningkatkan prestasi olahraga. Dengan adanya fasilitas yang berstandar internasional, para atlet dapat berlatih dengan lebih baik dan meningkatkan kemampuan.

Selain itu, awal tahun 2026, Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menambah fasilitas olahraga baru untuk masyarakat yakni Kencana Mini Soccer di Kecamatan Sukajadi.

Lapangan mini soccer yang dibangun ini terbuka untuk umum dan dapat digunakan secara gratis oleh warga setempat. Lokasi lapangan berada di pusat kota atau persimpangan Jalan Melur, kawasan bekas Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang lama.

Kehadiran Kencana Mini Soccer diharapkan dapat menjadi sarana olahraga serta ruang interaksi positif bagi warga, terutama di Kecamatan Sukajadi.

Wali Kota Agung Nugroho meresmikan langsung lapangan tersebut pada pertengahan Januari lalu. Ia mengungkapkan, lapangan ini dibangun sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas olahraga yang mudah diakses oleh masyarakat.

"Lapangan ini gratis untuk masyarakat. Syaratnya hanya satu, masuk bersih dan pulang juga harus bersih. Waktu pemakaian akan diatur agar bisa digunakan secara tertib dan bergantian," katanya.

Ia berharap dengan adanya fasilitas ini, warga dapat semakin aktif berolahraga,



FASILITAS OLAHRAGA - Wali Kota Pekanbaru menghadirkan fasilitas olahraga di tengah masyarakat

mempererat kebersamaan, dan memanfaatkan fasilitas publik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditegaskan Agung, olahraga harus menjadi prioritas dalam pembinaan generasi muda. Selain menyehatkan, olahraga juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

Ketersediaan sarana olahraga yang mudah diakses diharapkan dapat mendorong anak-anak dan remaja lebih aktif bergerak serta berinteraksi secara sehat.

"Kita ingin anak-anak lebih banyak berolahraga, bersosialisasi, dan menjauh dari kebiasaan bermain gadget yang berlebihan," harap Agung.

Peresmian lapangan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendukung gaya hidup sehat dan meningkatkan kualitas fasilitas publik di tengah kota.

"Semua fasilitas ini dari masyarakat untuk masyarakat. Mari kita jaga bersama agar benar-benar bermanfaat bagi anak-anak dan masa depan Kota Pekanbaru," imbuhnya.

Fasilitas olahraga lainnya yang sudah direalisasikan Pemerintah Kota Pekanbaru berada di halaman kompleks perkantoran terpadu Tenayan Raya.

Sarana olahraga ini berupa lapangan tenis yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *



Nikah Massal Catatkan Rekor MURI



NIKAH MASSAL - Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar berada di tengah peserta nikah massal.

Program Perdana Agung Nugroho-Markarius Anwar

PROGRAM nikah massal gratis yang digelar pada 7 Desember 2025 di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru adalah program perdana di bawah kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM dan Wakil Wali Kota H Markarius Anwar.

Acara ini mencatatkan Rekor MURI untuk prosesi tepuk tepung tawar dengan peserta terbanyak. Kegiatan ini sekaligus juga menjadi ajang promosi Pekanbaru sebagai kota dengan pelayanan publik inovatif.

Program Nikah Massal Gratis Pemko Pekanbaru 2025 merupakan inisiatif membantu pasangan mendapatkan legalitas pernikahan sah, dengan 71 pasangan berpartisipasi pada Desember 2025.

Program ini mencakup biaya nikah, mahar, pakaian adat, hingga voucher menginap, serta menerbitkan KK/KTP-el langsung.

Program ini hanya untuk warga Pekanbaru dengan syarat administrasi tertentu (KTP, KK, surat keterangan belum menikah). Latar belakang utama program nikah massal Pemko Pekanbaru untuk membantu masyarakat



TEPUNG TAWAR - Wali Kota Agung Nugroho tepuk tepung tawar peserta nikah massal.

yang kesulitan biaya pernikahan, memberikan legalitas resmi bagi pasangan, serta memperkuat nilai budaya dan kebersamaan. Program ini juga menjadi ajang promosi pelayanan publik dan melibatkan dukungan swasta agar lebih meriah dan inklusif.

Puluhan ribu warga padati kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman. Mereka turut meramaikan kegiatan Nikah Massal Gratis yang diikuti 71 pasang. Calon pengantin mengikuti arak-arakan dari Masjid Agung Ar Rahman, Jalan Jendral Sudirman.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho SE MM dan Wakil Wali Kota, Markarius Anwar ST MARch serta pejabat Forkopimda memimpin arak-arakan. Wali Kota Agung Nugroho yang hadir langsung dalam acara tersebut menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan mulia ini.

Ia menegaskan bahwa nikah massal merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melayani kebutuhan dasar warganya. Khususnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum pernikahan. Puluhan pengantin juga menjalani arak-arakan di Jalan Jenderal Sudirman menuju MPP Pekanbaru.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama menyaksikan kebahagiaan 71 pasangan pengantin. Ini adalah bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memfasilitasi saudara-saudara kita agar pernikahannya tercatat secara resmi," kata Agung dalam sambutannya. Wali kota menambahkan bahwa dengan tercatatnya pernikahan ini tentu hak-hak sipil pasangan suami istri beserta anak-anak mereka kelak akan lebih terjamin. Acara nikah massal semakin spesial dan meriah dengan kehadiran penceramah kondang tanah air, Ustadz Das'ad Latif. Kehadiran Ustadz Das'ad menjadi magnet tersendiri yang membuat ribuan masyarakat antusias berdesakan di area MPP. Ustadz Das'ad Latif memberikan nasihat pernikahan kepada para pengantin baru dengan gaya penyampaiannya yang khas; tegas, jenaka, namun sarat akan makna mendalam.

Ia menekankan pentingnya kesabaran, saling pengertian, dan menjadikan agama sebagai pondasi utama dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Disisi lain, kegiatan nikah massal gratis yang diselenggarakan Pemko Pekanbaru masuk dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). Yakni kategori Prosesi Tepuk Tepung Tawar dengan jumlah peserta terbanyak.



HADIAH UMRAH - Peserta beruntung mendapatkan hadiah umrah dan berbulan madu dari pemerintah kota.



AKAD NIKAH - Peserta nikah massal melaksanakan akad nikah yang dibimbing penghulu dari KUA.



REKOR MURI - MURI mencatatkan rekor untuk kategori Prosesi Tepuk Tepung Tawar dengan jumlah peserta terbanyak.

Disampaikan Agung, banyak yang digratiskan Pemko Pekanbaru untuk peserta nikah massal nanti. Di antaranya biaya pengurusan administrasi, biaya bimbingan pra nikah, serta biaya tes kesehatan dan pengobatan bagi calon pengantin.

Kemudian gratis foto prewedding, pakaian pengantin, make up artis, dekorasi tempat akad nikah dan pelaminan, serta foto dan dokumentasi.

Selanjutnya ada voucher menginap di hotel dan undian umrah gratis bagi pasangan yang beruntung. Prosesi pernikahan disaksikan langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

"Jadi banyak sekali yang didapat (calon pasutri peserta nikah massal gratis)," ungkap Agung.

Sidang Isbat Nikah Gratis merupakan upaya Pemko Pekanbaru untuk membantu mempermudah warga dalam mengurus administrasi kependudukan (adminduk) seperti Kartu Keluarga (KK). Warga atau pasutri yang menikah secara agama namun belum memiliki buku nikah dan terdaftar di negara, mereka tidak bisa mengurus adminduk sehingga berdampak terhadap anak.

"Jadi, ini bagaimana menolong anak-anak Kota Pekanbaru yang tidak masuk ke dalam KK, karena orang tuanya belum mengurus administrasi kependudukan, karena belum ada buku nikah resmi," ucapnya.

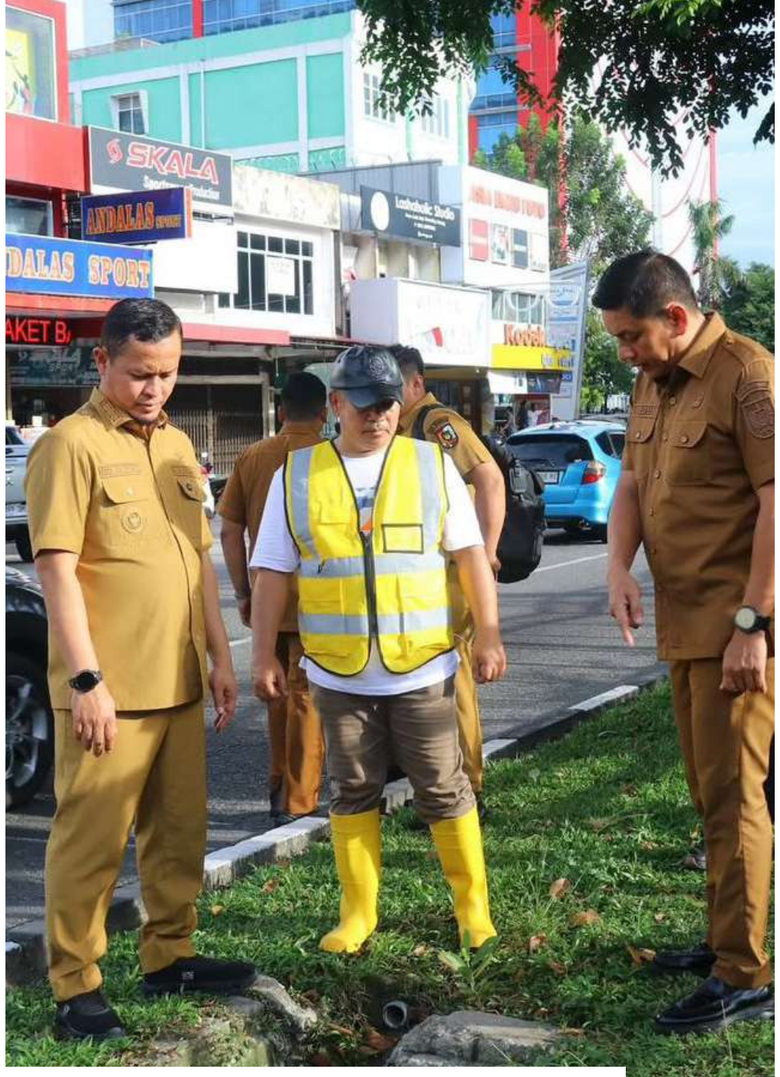
Dalam kegiatan ini, banyak sponsor berpartisipasi. Pemko Pekanbaru akan menjadikan nikah massal sebagai program berkelanjutan, dengan dukungan sponsor agar tidak membebani APBD. *

Wali Kota Pekanbaru Fokus Atasi Masalah Banjir

Drainase Jalan Kembali Berfungsi

SELAMA bertahun-tahun persoalan banjir menjadi masalah rutin yang banyak dikeluhkan masyarakat Pekanbaru. Hal ini menjadi dasar Wali Kota H Agung Nugroho SE MM memasukkan pengendalian banjir sebagai satu proyek strategis sejak awal kepemimpinannya. Pengendalian banjir di Pekanbaru pada periode Wali Kota Agung Nugroho difokuskan pada pembenahan drainase yang tertutup bangunan, penerapan sistem biopori mulai 2026, serta perbaikan saluran air agar genangan lebih cepat surut.

Kendati banjir masih terjadi di titik-titik rawan, hasil awal menunjukkan air kini lebih cepat mengalir dibanding tahun-tahun sebelumnya.



CEK DRAINASE - Wali Kota Agung Nugroho mengecek kondisi drainase jalan sebelum dilakukan normalisasi.



GORO BERSAMA - Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar goro bersama membersihkan drainase.

"Banjir ini tidak terjadi pada tahun ini saja, tapi sudah terjadi hampir 15 tahun. Penyebabnya banyak bangunan berada di atas drainase, menutup drainase, selokan. Baik itu dari bangunan liar maupun sedimen yang sudah tinggi," kata Agung.

Lalu lintas di ruas jalan protokol di Pekanbaru kadang mengalami kemacetan parah, akibat badan jalan terendam air. Beberapa ruas jalan itu di antaranya, Jalan Jendral Sudirman, Tuanku Tambusai, dan Arifin Ahmad.

Ia memastikan, Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini focus untuk melakukan penanganan banjir. Apalagi hampir seluruh drainase di Pekanbaru tidak berfungsi secara baik.

Wali kota mengibaratkan, Pekanbaru saat ini seperti kuali dan tentu harus ada saluran air yang harus diteruskan ke muara. Penanganan banjir yang dilakukan sejak beberapa waktu lalu juga dinilai sudah membuahkan hasil terbukti banjir merendam beberapa wilayah lebih cepat surut. Seperti di Jalan Sudirman depan RS Awal Bros, Pasar Buah, Pasar Pagi Arengka, dan Jalan Arifin Ahmad.

"Sejumlah tempat yang kita pantau dan diberikan tindakan, sudah membaik. Air yang terkurung lama sampai 30 menit sekarang cepat surut. Drainase yang kita angkat sedimennya mengalirkan air dengan baik. Walau memang masih ada yang belum, tapi beberapa upaya sudah membuahkan hasil," jelas wali kota saat memantau dampak hujan di Pekanbaru.

Disamping itu, walikota menilai perlu pembaruan sistem penanganan banjir. Apalagi Masterplan pengendalian banjir yang dimiliki pemerintah kota saat ini tidak bisa digunakan lagi karena berbeda kondisi permasalahan banjir.

"Masterplan banjir itu sudah tidak bisa digunakan, harus diperbaharui. Karena seluruh drainase di Kota Pekanbaru hampir 90 persen tersumbat," kata Agung.

Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan adalah membuat masterplan pengendalian banjir terlebih dahulu sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab jika mengacu pada masterplan pengendalian banjir yang disusun tahun 2020 lalu, Pemerintah Kota Pekanbaru membutuhkan anggaran cukup besar untuk menyelesaikan banjir. Anggaran itu tidak bisa dibebankan sepenuhnya melalui APBD.

Berdasarkan masterplan lama, terdapat sebanyak 361 titik persoalan banjir yang harus diselesaikan.

"Kalau dieksekusi semua masterplan itu, Pekanbaru bebas banjir. Namun anggarannya tidak ada. Ini tidak cukup dengan APBD kota saja. Saya memang harus jemput bola ke pusat," terang Agung.



TINJAU BANJIR - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau kondisi banjir di sejumlah ruas jalan.



SEDOT LUMPUR - Dinas PUPR Pekanbaru melakukan normalisasi drainase jalan dengan menyedot sedimen lumpur.

Pemerintah kota akan menerapkan sistem biopori untuk penanganan banjir di tahun 2026 guna meningkatkan resapan air hujan ke dalam tanah.

Pemko Pekanbaru menjalin kerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta terkait penggunaan sistem biopori.

Untuk memaksimalkan penanganan banjir di Kota Pekanbaru, wali kota akan jemput bola ke Pemerintah Pusat guna mendapatkan dana APBN.

Di samping bantuan pusat, Pemerintah Kota Pekanbaru juga membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Dengan adanya kolaborasi antara Pemko Pekanbaru, provinsi dan pusat, Agung Berharap persoalan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bisa cepat diatasi.

Dukungan dari pusat dan provinsi sejalan dengan masterplan pengendalian banjir. Karena dari 361 titik persoalan banjir yang harus diselesaikan, hanya 280 titik yang menjadi kewenangan Pemko Pekanbaru.

Sementara 81 titik lagi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, provinsi, dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar. Agung mengatakan, dengan adanya kerja sama dari pusat dan provinsi, banjir akibat luapan Sungai Siak yang sempat merendam kawasan Kecamatan Rumbai saat musim hujan kini sudah mulai surut.

Agung menyatakan, sekitar 98 persen publik juga puas dengan penanganan yang dilakukan Pemko Pekanbaru dibantu pusat dan provinsi.

"Maka Pekanbaru menjadi paling cepat dalam penanganan (banjir). Insyaallah tidak ada komplain, walaupun kita belum bisa memuaskan semua pihak karena jumlahnya (warga terdampak) cukup banyak," imbuhnya.

Optimalkan Mobil Sedot Lumpur

Dalam penanganan banjir, Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2025 mendapatkan bantuan mobil penyedot lumpur dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pemko melalui Dinas PUPR juga melakukan pengadaan satu unit mobil penyedot lumpur. Mobil tersebut dianggarkan menggunakan APBD tahun 2025.

Awal pengoperasian, mobil sedot lumpur dikerahkan untuk membersihkan sedimen yang menumpuk dalam saluran pembuangan air atau drainase di Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Pasar Pagi Arengka, pada April tahun 2025.*



JALAN MULUS - Pengendara nyaman melintasi ruas jalan di Kota Pekanbaru yang kembali mulus.

Wali Kota Pekanbaru Percepat Perbaikan Infrastruktur

Fokus Perbaiki Jalan Pinggir Kota

WALI KOTA Pekanbaru, Agung Nugroho menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur. Memasuki tahun anggaran 2026, pemetaan ulang ruas-ruas jalan rusak mulai dilakukan sebagai langkah awal percepatan pembangunan, dengan fokus utama pada jalur strategis yang memiliki volume kendaraan tinggi.

Program ini menjadi bagian dari visi besar Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar dalam membenahi infrastruktur kota secara bertahap dan terukur.

Pemko Pekanbaru menargetkan perbaikan lebih dari 42 kilometer jalan rusak sepanjang tahun 2026. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Edward Riansyah menyebutkan, percepatan perbaikan jalan merupakan instruksi langsung dari wali kota. "Ada percepatan perbaikan jalan yang menjadi prioritas bapak wali kota. Minimal target kita tahun ini 42 kilometer," ujarnya.

Menurutnya, target tersebut merupakan bagian dari rencana jangka menengah, di mana Pemko Pekanbaru menargetkan perbaikan hingga 100 kilometer jalan dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perbaikan jalan pada 2026 tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi menyasar wilayah pinggiran yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.

Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan pembangunan serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Pekanbaru. Jalan-jalan dengan tingkat mobilitas tinggi tetap menjadi prioritas utama guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.

Program perbaikan jalan ini merupakan kelanjutan dari upaya yang telah digencarkan sejak 2025. Saat itu, Pemko Pekanbaru berhasil melampaui target dengan melakukan pengaspalan sepanjang 42 kilometer, jauh di atas target awal 20 kilometer.

Perbaikan dilakukan dengan metode overlay atau pelapisan ulang aspal dan mencakup 29 ruas jalan yang tersebar di 15 kecamatan.

Sejumlah ruas jalan yang telah diperbaiki antara lain Jalan Serayu, Jalan Kulim, Jalan Jendral, Jalan Angkasa, Jalan Garuda, Jalan Melur, Jalan Cempaka, Jalan Pepaya. Jalan Teratai, Jalan Rajawali, Jalan T Mahmud II dan Jalan Mandala.

Selain itu, pembangunan Jalan Taman Simpang Arifin juga dilakukan untuk membantu mengurai kemacetan di sejumlah titik, termasuk di Jalan Jendral Sudirman.

Pada tahun 2026, Pemko Pekanbaru menargetkan pengerjaan pada 21 ruas jalan. Dari jumlah tersebut 4 ruas merupakan pembangunan jalan baru dan 17 ruas lainnya



KOMITMEN WAKO - Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius berkomitmen mempercepat perbaikan jalan rusak.



PERBAIKI JALAN - Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius ikut memperbaiki jalan.

akan dilakukan overlay.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat mempercepat peningkatan kualitas jalan sekaligus membuka akses baru di beberapa kawasan.

Wali Kota Agung Nugroho menegaskan bahwa pelaksanaan proyek tidak akan menunggu hingga akhir tahun. Setelah APBD disahkan, pengerjaan diminta segera dimulai di lapangan.

"Kami mendorong agar perbaikan ini dilakukan secepat mungkin. Instruksi sudah jelas, segera eksekusi," tegas Agung. Langkah percepatan ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi keluhan terkait jalan rusak yang selama ini menjadi persoalan klasik di Kota Pekanbaru.

Perbaikan infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi menjadi pondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akses jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang, mobilitas warga, hingga konektivitas antarwilayah.

Dengan target ambisius dan dukungan anggaran yang besar, Pemko Pekanbaru optimistis program ini mampu meningkatkan kenyamanan transportasi publik sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak.

Upaya percepatan perbaikan jalan yang digagas Pemko Pekanbaru menunjukkan arah pembangunan yang semakin terencana dan merata.

Di bawah kepemimpinan Agung Nugroho, pembenahan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pinggiran.

Jika target 42 kilometer pada 2026 tercapai, maka langkah menuju ambisi perbaikan 100 kilometer jalan dalam beberapa tahun ke depan semakin terbuka lebar.

Kebijakan ini pun diharapkan menjadi solusi nyata atas persoalan jalan rusak yang selama ini dikeluhkan masyarakat. *



TINJAU LOKASI - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau lokasi jalan rusak.

Seleksi Penerima Bantuan Objektif dan Transparan



HARI GURU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar bersama siswa SD usai memperingati Hari Guru.

Program Beasiswa Pemko Pekanbaru untuk Semua Jenjang Pendidikan

PEMERINTAH Kota Pekanbaru membuka program beasiswa bagi masyarakat, mulai pelajar disabilitas hingga hafiz Alquran. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai D3, S1, S2 hingga S3, termasuk peluang studi ke luar negeri.

Pendaftaran beasiswa dilakukan secara online melalui laman resmi milik Pemko Pekanbaru. Kebijakan pendaftaran daring ini sengaja diterapkan untuk memastikan proses berjalan transparan dan menghindari praktik tidak sehat.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setdako Pekanbaru, Tri Sepna Saputra mengatakan, sistem online memungkinkan seleksi dilakukan lebih objektif.

"Pendaftaran kita buka secara online. Persyaratan sudah terlampir di sana, sehingga tidak ada tatap muka dan menghindari spekulasi negatif," ujarnya.

Ia menegaskan, hanya peserta yang benar-benar memenuhi syarat yang akan lolos seleksi. "Jadi tidak ada main mata, semuanya murni berdasarkan persyaratan yang ditentukan," tambahnya.

Program beasiswa ini merupakan gagasan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Pemko Pekanbaru mengalokasikan anggaran lebih Rp 10 miliar melalui APBD Perubahan 2025 untuk mendukung program tersebut.

Agung Nugroho menyebutkan, beasiswa ini tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa D3 dan S1, tetapi mencakup jenjang S2 dan S3, termasuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada para hafiz Alquran, mulai dari hafalan 10 juz hingga 30 juz, serta santri di pesantren.

Tidak hanya itu, penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan melalui program ini.

"Artinya, program ini menjangkau semua kalangan. Ada beasiswa untuk disabilitas, tahfidz, pesantren, hingga mahasiswa luar negeri," jelas Agung.

Pemko Pekanbaru menyiapkan lebih dari 1.000 kuota beasiswa dalam program ini. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat melahirkan generasi unggul yang nantinya kembali membangun daerah.

"Kita ingin anak-anak Pekanbaru menjadi orang-orang pintar dan kembali membangun kota ini agar lebih maju dan masyarakatnya sejahtera," harapnya.

Sementara itu, setelah masa pendaftaran berakhir, tercatat sebanyak 1.709 peserta mendaftar hingga penutupan pada 9 Desember 2025.

Wako Agung mengungkapkan, jumlah tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program beasiswa Pemko Pekanbaru. "Alhamdulillah hingga hari terakhir, total ada 1.709 peserta yang mendaftar," katanya.

Dari jumlah tersebut, mayoritas pendaftar berasal dari mahasiswa S1 yang mencapai sekitar 80 persen. Program ini diikuti peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Saat ini, proses seleksi telah memasuki tahap verifikasi faktual. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan para peserta.

"Verifikasi ini penting untuk memastikan data sesuai kondisi di lapangan. Jangan sampai ada yang tidak layak tapi tetap mengajukan," tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, program beasiswa terbagi dalam tujuh jalur, yakni jalur tahfidz, kurang mampu, prestasi, afirmasi, luar negeri, S2, dan S3.

Rinciannya, jalur tahfidz diikuti 41 orang, terdiri dari hafalan 10 juz sebanyak 16 orang, 20 juz 5 orang, dan 30 juz 20 orang. Jalur kurang mampu untuk S1 sebanyak 342 orang dan D3 sebanyak 19 orang.

Kemudian, jalur prestasi menjadi yang paling diminati dengan 1.061 pendaftar S1 dan 84 orang D3. Untuk jalur afirmasi tercatat 2 orang, jalur luar negeri 6 orang, sementara S2 sebanyak 95 orang dan S3 sebanyak 59 orang.

Dengan tingginya minat masyarakat, Pemko Pekanbaru optimistis program ini mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. *



BEASISWA - Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan komitmen dalam memajukan Pendidikan termasuk memberikan beasiswa.



PERALATAN SEKOLAH - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyerahkan bantuan keperluan sekolah di Kelurahan Sialang Rampai.



TRANSPARAN - Wali Kota Pekanbaru menegaskan seleksi penerima beasiswa secara transparan dan objektif.



ARMADA - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM berfoto di depan satu armada pengangkut sampah seusai soft launching Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

LPS Ujung Tombak Atasi Sampah

Pekanbaru Bebas Sampah Bukan Sekadar Impian

PEMERINTAH Kota Pekanbaru sukses benahi pengelolaan sampah yang selama ini menjadi persoalan klasik. Langkah terobosan itu bernama LPS atau Lembaga Pengelola Sampah.

Melalui kebijakan ini, pengelolaan sampah tidak lagi bergantung pada pihak ketiga. Melainkan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat.

Semua itu berawal dari cita-cita Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM yang ingin menjadikan Kota Bertuah sebagai Kota Bebas Sampah.

Atas dasar itulah LPS terbentuk, sebagai solusi nyata penanganan sampah di Kota Pekanbaru.

"Kehadiran LPS bukan sekadar formalitas, melainkan solusi nyata untuk memutus rantai penumpukan sampah yang selama ini menjadi keluhan di tengah pemukiman," ungkap Wali Kota Agung Nugroho. Kini, LPS berhasil dibentuk dan tersebar di 83 kelurahan yang mencakup 15 kecamatan di Pekanbaru. Lembaga ini diposisikan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan sampah dari rumah-rumah padat penduduk.

Bahkan mekanisme yang ditawarkan LPS dirancang untuk memberikan kemudahan bagi warga dalam membuang limbah rumah tangga mereka.

Masyarakat cukup memasukkan sampah rumah tangganya ke tempat sampah dan diangkut oleh petugas LPS di depan rumah.

Agung mengakui, awal pembentukan, banyak pihak meragukan keberadaan LPS. LPS dinilai akan semakin membebani APBD dan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan sampah.

"Tapi saat ini, kemana pun kami turun, ketemu dengan kepala daerah, ceritanya ingin belajar dengan LPS Kota Pekanbaru," ujar Walikota Agung, disambut tepuk tangan ratusan anggota LPS di kesempatan itu.

Sejak dibentuk dan mulai diberdayakan pada Juli 2025 lalu, lanjut Wali Kota Agung, LPS 83 kelurahan sudah mampu mandiri tanpa adanya dukungan anggaran dari APBD.

"Di daerah lain, LPS nya atau pengelola sampahnya masih menggunakan subsidi dari pemerintah. Kita, LPS nya bisa mandiri tanpa APBD," tegasnya. Agar kinerja LPS bisa lebih maksimal, Wali Kota Agung memerintahkan agar seluruh camat dan lurah mendukung LPS. "Karena LPS merupakan lembaga resmi yang menyelamatkan wajah Pekanbaru. Tanpa dukungan camat dan lurah, maka LPS tidak akan bisa berjalan sendiri dalam menjaga kebersihan," ujarnya.

Peran ketua RT dan RW menjadi satu kunci utama. Mereka dilibatkan untuk sama-sama menyadarkan masyarakat agar tak buang sampah sembarangan dan bisa memilah sejak dari rumah.

"Khusus kepada seluruh perangkat RT dan RW agar proaktif dalam mengawal keberlangsungan program ini.



SK LPS - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM menyerahkan SK kepada seorang petugas LPS kelurahan.



JAMBORE - Wali Kota H Agung Nugroho SE MM menyapa pengurus LPS se-Kota Pekanbaru saat menghadiri Jambore LPS.

Dukungan dari tokoh lingkungan sangat diperlukan agar masyarakat teredukasi untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan atau ke tempat pembuangan liar," ulas Agung.

Target besar yang ingin dicapai kini adalah konsistensi pengangkutan sampah yang dilakukan setiap hari tanpa jeda. Tentunya dengan ritme penjemputan yang terjadwal, Agung optimis tumpukan sampah segera teratasi.

"Melalui kolaborasi antara pemerintah dan kesadaran tinggi dari warga, harapan menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang bebas sampah bukan lagi sekadar impian," kata Agung.

Di sisi lain, pembentukan dan penguatan LPS di setiap kelurahan ternyata tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Keberadaan LPS di tingkat kelurahan telah berkontribusi mengurangi angka pengangguran di Kota Pekanbaru hingga sekitar 600-700 orang

Hal ini disampaikan Ketua Forum LPS Kota Pekanbaru, Suprapto. "Alhamdulillah, keberadaan LPS ini sudah banyak mengurangi pengangguran, lebih kurang sekitar 600 sampai 700 orang," ujarnya.

Menurutnya pelibatan masyarakat sebagai pengurus dan tenaga operasional LPS menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan.

Ia menyebut, meski kerap dipandang sebagai "penjual sampah", para pengelola dan pekerja LPS memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan kota. *



SILATURAHMI - Wali Kota H Agung Nugroho SE MM silaturahmi bersama petugas LPS se-Kota Pekanbaru di rumah dinas wali kota.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Pemko Pekanbaru

Deteksi Dini Penyakit Anak dan Pelajar



TINJAU PKG - Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho meninjau program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di sekolah.

WALI KOTA Pekanbaru, Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar menggencarkan program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) menyasar anak-anak. Mulai balita hingga pelajar tingkat SD sampai SLTA.

Program ini menjadi bagian dari prioritas Nasional yang diinisiasi Presiden RI, sekaligus diperkuat Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai langkah nyata meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda.

Wako Agung Nugroho menegaskan, program PKG bukan sekadar wacana, namun sudah dilaksanakan. Ia bahkan meninjau pelaksanaan PKG di sejumlah sekolah, seperti SDN 145, SMP Muhammadiyah 1 dan SMAN 2 Pekanbaru.

"Program ini namanya PKG, Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Anak-anak diperiksa secara menyeluruh, mulai dari gizi, tekanan darah, kolesterol, THT, hemoglobin, dan lainnya. Ini sejalan dengan upaya pencegahan stunting yang sudah kita jalankan," ujar Agung.

Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan oleh tenaga medis dari puskesmas setempat. Tujuannya untuk mendeteksi sejak dini potensi gangguan kesehatan, sekaligus memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Program ini menyasar tiga kelompok utama. Pertama, anak usia 0–6 tahun atau balita. Kedua, anak usia sekolah 7–17 tahun. Ketiga, masyarakat umum yang mendapatkan layanan khusus saat hari ulang tahun. Untuk balita, Pemko Pekanbaru menyiapkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh puskesmas. Program ini akan difokuskan pada anak usia 0 hingga 5 tahun sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting.

"Untuk balita, kita siapkan cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas. Ini bentuk komitmen kita dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat," kata Agung.

Ia menambahkan, program ini turut didukung Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan akan diperkuat melalui koordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan di Pekanbaru.

Sementara untuk masyarakat umum, program PKG memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang sedang berulang tahun. Layanan ini sudah mulai berjalan sejak 3 Februari 2025 di seluruh puskesmas.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dr Fira Septiyanti menyebutkan, sebanyak 21 puskesmas siap melayani program tersebut.

"Untuk tahap awal, layanan cek kesehatan gratis saat ulang tahun baru tersedia di puskesmas. Ke depan, fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya juga akan disiapkan," jelasnya.



CEK KESEHATAN - Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar dan wali kota menyaksikan siswa cek kesehatan.

Jenis pemeriksaan yang diberikan cukup lengkap, mulai dari pemeriksaan laboratorium, gigi, jantung, hingga skrining kesehatan sesuai usia.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut menambahkan, saat ini pihaknya melakukan verifikasi kesiapan klinik yang bekerja sama dengan BPJS agar bisa ikut melayani program tersebut.

Pemko Pekanbaru menargetkan, melalui program ini, data terkait kondisi kesehatan, potensi penyakit, hingga kasus gizi buruk di masyarakat dapat dipetakan dengan lebih akurat.

"Target kita selesai dalam waktu dekat, sehingga kita punya data lengkap untuk langkah penanganan ke depan," kata Agung. Ia menyebut, antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh di seluruh sekolah di Pekanbaru, mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas. Dengan program ini, Pemko Pekanbaru berharap menciptakan generasi yang lebih sehat, sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyakit sejak dini di tengah masyarakat. *





SASAR SISWA - Program PKG menyasar kalangan pelajar untuk mendeteksi dan mengantisipasi penyakit sejak dini.



GRATIS PARKIR - Konsumen akan gratis parkir di seluruh ritel modern Pekanbaru.

Gebrakan Baru Wali Kota Pekanbaru
Parkir Gratis di Ritel Modern

Berdayakan Jukir Melalui Lapak UMKM

PEMERINTAH Kota Pekanbaru kembali menghadirkan kebijakan progresif yang langsung menyentuh masyarakat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Makarius Anwar, kebijakan parkir gratis resmi diberlakukan di ratusan gerai ritel modern sejak 1 Januari 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi besar dalam sistem pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru, yang sebelumnya berbasis retribusi kini beralih menjadi pajak parkir yang ditanggung oleh pihak perusahaan ritel.

Kebijakan parkir gratis ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemko Pekanbaru dengan dua jaringan ritel besar, yakni Alfamart dan Indomaret.

Wali Kota Agung menegaskan bahwa perubahan sistem ini bertujuan meringankan beban masyarakat. "Kalau dulu masyarakat bayar, sekarang gratis. Ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.

Dengan skema baru ini, masyarakat tidak lagi dikenakan biaya parkir saat berbelanja di gerai ritel modern. Sebagai gantinya, pihak ritel membayarkan pajak parkir kepada pemerintah daerah.

Kebijakan ini mencakup ratusan gerai di seluruh Pekanbaru. Sekitar 140 gerai Alfamart dan lebih dari 200 gerai Indomaret mulai menerapkan parkir gratis secara serentak sejak awal 2026.

Penandatanganan MoU dengan Alfamart dilakukan pada 30 Desember 2025, disusul kerja sama dengan Indomaret pada 31 Desember 2025 di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Dengan demikian, hampir seluruh jaringan ritel modern utama di Pekanbaru kini menyediakan fasilitas parkir gratis bagi pelanggan.

Satu perhatian utama dalam kebijakan ini adalah nasib para juru parkir (jukir) yang selama ini menggantungkan penghasilan dari retribusi parkir.

Pemko Pekanbaru memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menimbulkan pengangguran baru. Dalam MoU, kedua perusahaan ritel diwajibkan memberikan solusi konkret bagi para jukir terdampak.

"Tidak boleh ada yang dirugikan. Karena itu, kami atur kewajiban pihak ritel untuk menampung atau memberikan solusi bagi petugas parkir," tegas Agung. Pihak Indomaret dan Alfamart berkomitmen untuk merekrut jukir menjadi karyawan sesuai standar operasional perusahaan, memberikan pelatihan bagi yang tidak memenuhi kriteria, menyediakan lapak usaha gratis di halaman gerai.

Langkah ini membuka peluang bagi para mantan jukir untuk beralih menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai tindak lanjut, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan terhadap para eks jukir.

Plt Kepala Dishub Pekanbaru, Masykur Tarmizi menjelaskan bahwa proses ini berlangsung hingga 28 Februari 2026. Para jukir diminta datang langsung ke gerai tempat mereka sebelumnya bekerja dengan membawa identitas resmi sebagai bukti.

Pendataan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data jukir terdampak, memfasilitasi proses rekrutmen oleh pihak ritel dan menyalurkan program pelatihan dan pemberdayaan.

Selain itu, eks jukir yang memilih jalur usaha akan mendapatkan lapak UMKM gratis, dengan syarat dikelola sendiri dan tidak diperjualbelikan.

Pihak ritel menyatakan kesiapannya menjalankan seluruh poin kesepakatan. Perwakilan Alfamart Pekanbaru, Muhson, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan ini.

"Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih nyaman kepada masyarakat sekaligus menjalankan kewajiban perusahaan sesuai kesepakatan," ujarnya.

Kebijakan parkir gratis ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa penghematan biaya bagi masyarakat, tetapi juga dirancang dengan pendekatan berkelanjutan.

Pemko Pekanbaru tidak sekadar menghapus pungutan, tetapi juga menata ulang sistem parkir menjadi lebih modern, melindungi pekerja sektor informal dan mendorong pertumbuhan UMKM.

Dengan pendekatan ini, kebijakan parkir gratis menjadi contoh bagaimana inovasi layanan publik dapat berjalan beriringan dengan perlindungan sosial.

Langkah berani Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Agung Nugroho dan Makarius Anwar ini menjadi bukti nyata keberpihakan kepada masyarakat.

Parkir gratis bukan hanya soal menghapus biaya, tetapi juga menghadirkan sistem yang lebih adil, tertata, dan manusiawi.

Di tengah berbagai tantangan perkotaan, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan warga sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi mereka yang terdampak. ***BERTUAH**



PRO MASYARAKAT - Kebijakan gratis parkir di ritel modern merupakan kebijakan pro masyarakat Pemko Pekanbaru.



NOTA KESEPAHAMAN - Perwakilan ritel modern menandatangani nota kesepahaman terkait penerapan parkir baru.

PAD Melonjak Hingga Rp 1,1 Triliun



LAYANAN PAJAK - Bapenda Pekanbaru membuka layanan pembayaran pajak di kawasan Car Free Day (CFD) setiap Minggu pagi.

Fiskal Terjaga Melalui Kreativitas dan Strategi Wali Kota

Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana pusat, Pemerintah Kota Pekanbaru justru mencatatkan lompatan besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di balik capaian itu, ada strategi terukur, kebijakan berani, dan perubahan cara pandang dalam mengelola keuangan daerah.

Wali Kota Agung Nugroho tidak menampik bahwa tahun 2025 adalah periode penuh tantangan. Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp 433 miliar, angka yang cukup besar bagi roda pemerintahan daerah.

Namun alih-alih terjebak dalam keterbatasan, Agung memilih jalur berbeda: efisiensi dan kreativitas.

"Program harus tetap jalan. Kuncinya ada di manajemen yang kreatif," ujarnya dalam rilis akhir tahun di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Langkah ini terbukti efektif. Di saat banyak daerah melakukan penyesuaian bahkan pemotongan anggaran, Pekanbaru justru melaju. Hasilnya tidak main-main. PAD Kota Pekanbaru melonjak drastis dari sekitar Rp800 miliar menjadi hampir Rp1,17 triliun pada akhir 2025, kenaikan sekitar 43 persen.

Lonjakan ini memberikan ruang fiskal lebih luas untuk pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu langkah paling mencolok adalah penertiban reklame ilegal. Ratusan tiang baliho tanpa izin dipotong.

Kebijakan tegas ini ternyata memicu efek psikologis positif. Para pelaku usaha justru berbondong-bondong mengurus izin dan membayar pajak reklame. Di sisi lain, Agung mengambil langkah yang tidak biasa. Yakni menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya sempat melonjak hingga 300 persen. Hasilnya partisipasi masyarakat justru meningkat tajam.

"Masyarakat mau bayar karena merasa adil dan manfaatnya terasa," kata Agung.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak selalu lahir dari tekanan, tetapi dari rasa kepercayaan. Kenaikan PAD tidak berhenti sebagai angka di laporan keuangan. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Sepanjang 2025, Pemko Pekanbaru berhasil memperbaiki jalan sepanjang 42 kilometer—melampaui target awal 20 kilometer. Untuk 2026, target dinaikkan menjadi 60 kilometer, ditambah anggaran Rp100 miliar untuk pembenahan drainase kota.

Di sisi internal, pemerintah juga tetap mampu membayarkan TPP dan gaji ke-14 pegawai secara penuh, sesuatu yang tidak semua daerah mampu melakukannya.

Efisiensi juga dilakukan dari dalam. Satu kebijakan unik adalah pengawasan ketat terhadap perjalanan dinas (SPPD). Setiap pegawai, mulai dari staf hingga pejabat eselon, wajib mendapatkan izin langsung dari walikota untuk perjalanan luar kota.



PAD MENINGKAT - Wako Pekanbaru Agung Nugroho memaparkan peningkatan PAD dalam refleksi akhir tahun 2025.

Dampaknya signifikan, pengeluaran berkurang, anggaran bisa dialihkan ke kebutuhan prioritas seperti infrastruktur dan layanan publik.

Digitalisasi Sistem Perpajakan

Wakil Wali Kota Markarius Anwar ungkapkan bahwa satu kunci utama lonjakan PAD adalah digitalisasi melalui sistem Smart Tax.

Sistem ini terintegrasi dengan perizinan, sehingga setiap aktivitas usaha otomatis terhubung dengan potensi pajak. "Semua tercatat, transparan, dan real time," ujarnya.

Digitalisasi ini meminimalkan kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas. Meski capaian mengesankan, tantangan masih ada. Salah satu yang menjadi sorotan adalah sektor parkir, terutama di gerai ritel modern.

Evaluasi menemukan setoran juru parkir di beberapa titik hanya berkisar Rp 650 hingga Rp 1.300 per hari, angka yang jauh dari potensi sebenarnya. "Ini jelas belum mencerminkan kondisi di lapangan," kata Markarius.

Sebagai solusi, Pemko tengah mengkaji penerapan sistem e-parking untuk mencatat transaksi secara otomatis dan menutup celah manipulasi.

Kinerja Pemko Pekanbaru juga mendapat perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2025, BPK memberikan apresiasi atas peningkatan PAD yang signifikan. Namun, beberapa catatan tetap diberikan, antara lain optimalisasi PAD ke depan, pembenahan tata kelola parkir dan pendataan aset daerah.

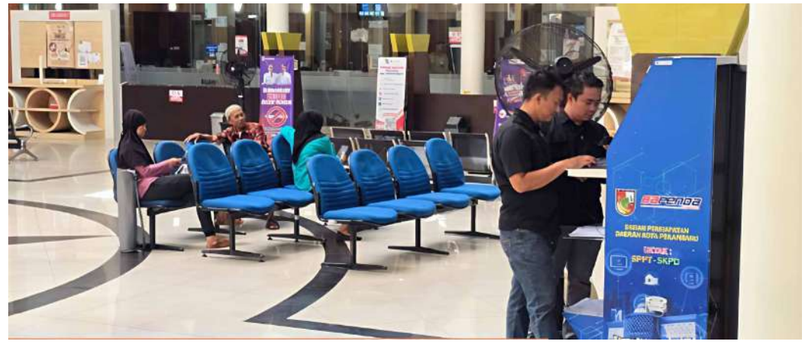
Agung menegaskan bahwa catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi. Ia bahkan optimistis Pekanbaru bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penilaian berikutnya.

Apa yang terjadi di Pekanbaru hari ini bukan sekadar keberhasilan jangka pendek. Ini adalah tanda transformasi. Dari ketergantungan pada dana pusat menuju kemandirian fiskal. Dari sistem manual menuju digital. Dari pendekatan represif menuju partisipatif.

Jika konsistensi ini terus dijaga, Pekanbaru berpotensi menjadi contoh nasional dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sebuah bukti bahwa di tengah keterbatasan, strategi yang tepat bisa mengubah arah, bahkan melampaui ekspektasi.

Plt Kepala Bapenda, Tengku Denny Muharapan menyebut capaian ini sebagai hasil sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat.

"Ini bukan hanya soal angka. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat meningkat dan sistem kita semakin baik," jelasnya. *



SISTEM DIGITAL - Loket pembayaran PBB-P2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menggunakan sistem digital.



BAYAR PAJAK - Warga antusias membayar pajak PBB-P2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Pertama di Provinsi Riau

Pemko Pekanbaru Resmi Terapkan Manajemen Talenta ASN



DIHADIRI WAKO - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengikuti rapat ekspose Manajemen Talenta ASN bersama Badan Kepegawaian Negara.

PEMERINTAH Kota Pekanbaru resmi menerapkan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai sistem pengembangan karier dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Ini merupakan langkah pertama bagi pemerintah daerah di Provinsi Riau.

Penerapan Manajemen Talenta ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penguatan sistem merit, serta penempatan ASN berdasarkan kompetensi dan kinerja.

Wali Kota Agung Nugroho menyebutkan, kebijakan tersebut dilaksanakan setelah pemerintah kota memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 68 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. "Dengan diterapkannya Manajemen Talenta, Pemerintah Kota Pekanbaru tidak lagi menggunakan mekanisme assessment konvensional dalam pengisian jabatan. Pengisian jabatan dilakukan berdasarkan pemetaan talenta ASN yang objektif, terukur, dan transparan, sesuai prinsip sistem merit," kata Agung.

Persetujuan penerapan Manajemen Talenta diberikan BKN setelah dilaksanakan rapat ekspose antara BKN dan Tim Manajemen Talenta Pemerintah Kota Pekanbaru pada 23 Januari 2026.

Dalam keputusan tersebut, BKN menyetujui penerapan Manajemen Talenta sebagai dasar pengembangan karier dan mobilitas jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru "Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi pemerintah daerah pertama di Provinsi Riau yang menerapkan Manajemen Talenta ASN secara resmi," kata Wako Agung.

Pelaksanaan sistem ini dilakukan dengan prinsip objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel, serta bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.



MANAJEMEN TALENTA - Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menerapkan Manajemen Talenta ASN sebagai sistem pengembangan karier dan pengisian jabatan.

Dalam pelaksanaannya, kata Agung, Pemko tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara, serta akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan penerapan Manajemen Talenta berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Pemerintah Kota Pekanbaru optimistis penerapan Manajemen Talenta ASN ini akan memperkuat profesionalisme aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," katanya.

Manajemen Talenta dirancang untuk memastikan proses mutasi maupun promosi bebas dari intervensi politik serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Seluruh data talenta dikelola secara akuntabel untuk menjamin profesionalisme aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sistem ini mengintegrasikan data melalui aplikasi SIMATA BKN dan e-Kinerja untuk transparansi karier dan pengisian jabatan, bebas dari intervensi politik.

Meski memiliki kemandirian dalam memetakan posisi jabatan, Pemerintah Kota Pekanbaru tetap diwajibkan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara.

Evaluasi berkala akan dilakukan oleh pusat guna memastikan pelaksanaan manajemen karier tersebut tetap berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali kota memastikan setiap rotasi dan pelantikan dilakukan murni berdasarkan pertimbangan profesionalitas, tanpa adanya tendensi tertentu maupun praktik "setoran".

Ia menegaskan bahwa integritas menjadi landasan utama dalam penempatan jabatan di masa kepemimpinannya guna menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.

"Pelantikan adalah hasil dari manajemen talenta yang telah kita jalankan. Ini bukan sekadar soal promosi jabatan, melainkan penempatan sosok-sosok berprestasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung program-program strategis kepala daerah," tegas wali kota. Ia menjelaskan bahwa proses manajemen talenta tersebut telah dilakukan sejak jauh hari melalui serangkaian evaluasi kompetensi.

Mekanisme ini sengaja diterapkan untuk memastikan setiap pejabat berada pada posisi yang tepat (the right man on the right place) sekaligus menutup celah praktik transaksional yang kerap memanfaatkan momentum mutasi jabatan. Menurutnya, pergeseran posisi di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang lumrah untuk melakukan penyegaran organisasi.

Dengan adanya rotasi ini, diharapkan muncul inovasi-inovasi baru dari para kepala dinas dan camat yang baru dilantik, terutama dalam menangani isu-isu krusial perkotaan seperti infrastruktur dan pelayanan sosial.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto memberi apresiasi kepada Pemko Pekanbaru atas persetujuan BKN untuk penerapan manajemen talenta.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pemko Pekanbaru atas persetujuan penerapan manajemen talenta dari BKN. Semoga Pekanbaru di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Agung Nugroho bisa meningkat lagi dan menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya," ucap plt gubri. Ia berharap Pemko Pekanbaru ke depan dalam menerapkan manajemen talenta dapat secara optimal sesuai tahapan, pedoman, dan ketentuan yang berlaku dengan prinsip objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, dan terbebas dari intervensi politik secara bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.



LANTIK PEJABAT - Pj Sekda Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut melantik pejabat sesuai penerapan manajemen talenta ASN.

"Dalam proses pelaksanaan pengisian jabatan melalui manajemen talenta, Pemerintah Kota Pekanbaru tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara," harapnya. Karena itu, lanjut Plt Gubri, Pemerintah Provinsi Riau juga dalam waktu dekat akan menerapkan manajemen talenta, dan saat ini usulan penerapan manajemen talenta ke BKN sedang berproses. "Dalam waktu dekat ini Pemprov Riau juga akan menerapkan manajemen talenta ke BKN, usulan sudah kami sampaikan dan saat ini dalam proses. Karena manajemen talenta ini sebagai dasar pengembangan talenta dan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan melalui mobilitas talenta," terangnya.

"Kami harap langka Pemko Pekanbaru juga dapat diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau lainnya. Sebab di Riau, baru Pemko Pekanbaru yang sudah mendapat persetujuan penerapan manajemen talenta dari BKN," tutupnya. ***



EKSPOS BKN - Badan Kepegawaian Negara dan pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan ekspose Manajemen Talenta ASN.



TARIF TURUN - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menurunkan tarif parkir kendaraan roda dua dan empat.

Wali Kota Tunaikan Janji Politik Turunkan Tarif Parkir

Respons Cepat Keluhan Masyarakat

WALI KOTA Pekanbaru Agung Nugroho langsung merealisasikan janji politik usai dilantik di Istana Negara oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Satu langkah cepat yang diambil adalah menurunkan tarif parkir di Kota Pekanbaru melalui Peraturan Wali Kota (Perwako). "Setelah pelantikan, saya langsung tanda tangan perwako penurunan tarif parkir. Ini sesuai janji kami saat kampanye," ujar Agung.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 20 Februari 2025. Tarif parkir untuk sepeda motor turun dari Rp 2.000 menjadi Rp 1.000, sedangkan kendaraan roda empat dari Rp 3.000 menjadi Rp 2.000.

Tak hanya menurunkan tarif, Pemko Pekanbaru melakukan evaluasi terhadap titik-titik pungutan parkir di lapangan. Langkah ini diambil untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat selama ini.

"Seluruh keluhan masyarakat akan kita tindaklanjuti dengan cepat," tegas Agung.

Penurunan tarif juga berlaku di kawasan pasar tradisional. Pengelolaan parkir di lingkungan pasar kini dialihkan dari Dinas Perhubungan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dengan tarif yang lebih murah. Kepala Disperindag Pekanbaru, Zulhelmi Arifin menyebut tarif parkir di pasar ditetapkan Rp 1.000 untuk roda dua dan Rp 2.000 untuk roda empat, sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Tarif di pasar memang lebih murah dibanding tepi jalan umum. Pengelolaannya juga akan ditangani langsung oleh bidang pasar," jelasnya.

Untuk memastikan kebijakan berjalan maksimal, Wali Kota Agung bahkan turun langsung ke lapangan. Ia meninjau kawasan kuliner malam di Jalan Cut Nyak Dien bersama jajaran, termasuk Dandim 0301 Pekanbaru Letkol Inf Ikhsanudin.

Dalam tinjauan itu, Wako Agung mengumpulkan para juru parkir (jukir) dan menyosialisasikan langsung tarif baru. Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

"Kalau parkir ini masih ribut-ribut, tentu merugikan semua pihak. Kita ingin kawasan ini nyaman dan tertib," tegasnya. Ia meminta penataan parkir lebih rapi agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan pengunjung.

Tak berhenti di penurunan tarif, Pemko Pekanbaru kembali membuat gebrakan dengan menghadirkan



JUKIR - Petugas Dishub menyosialisasikan tarif parkir kepada juru parkir.

kebijakan parkir gratis di ratusan gerai ritel modern mulai 1 Januari 2026.

Lebih dari 200 gerai Indomaret telah menerapkan parkir gratis, menyusul kerja sama sebelumnya dengan Alfamart. Kebijakan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemko dan pihak ritel.

Menurut Agung, sistem pengelolaan parkir kini berubah dari retribusi menjadi pajak parkir yang ditanggung pihak ritel, sehingga masyarakat tidak lagi dikenakan biaya.

"Kalau dulu masyarakat bayar, sekarang gratis. Ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. Ia menilai penurunan tarif parkir berdampak positif terhadap pengendalian inflasi di Pekanbaru.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tarif parkir sempat memicu inflasi sebesar 0,02 persen pada periode Juli 2022 hingga Juli 2023.

"Dengan penurunan ini, diharapkan bisa menekan inflasi," ujar Wahid.

Dukungan datang dari DPRD Pekanbaru. Fraksi Demokrat menilai kebijakan penurunan tarif parkir sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Anggota Fraksi Demokrat, Muhammad Zahirsyah, menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah nyata yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

"Kebijakan ini sangat membantu dan langsung dirasakan masyarakat. Ini luar biasa," katanya.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemko Pekanbaru menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih terjangkau, sekaligus menciptakan kenyamanan bagi masyarakat di ruang-ruang publik. *



SOSIALISASI TARIF - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyosialisasikan tarif baru parkir.



JANJI POLITIK - Penurunan tarif parkir merupakan realisasi janji politik Wali Kota Agung Nugroho.



TANJAK - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho tampil menggunakan tanjak Melayu pada sebuah acara.

Wali Kota Pekanbaru Komitmen Lestarikan Budaya Melayu

Berpakaian Melayu Setiap Hari Kamis

PEMERINTAH Kota Pekanbaru sejak tahun lalu terbitkan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Penggunaan Outer Melayu setiap Hari Kamis.

Wali Kota Agung Nugroho mengatakan, ada dua tujuan utama penggunaan outer Melayu atau pakaian yang dikenakan di bagian luar dari susunan pakaian tersebut.

Pertama, dengan penggunaan outer Melayu akan menjaga agar pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru tetap rapi saat menjalankan tugas melayani warga. "Karena biasanya di Hari Kamis para pegawai berpakaian olahraga, sehingga banyak pegawai setelah menggunakan baju olahraga, dia tidak lagi memakai baju ganti kemeja yang digunakan untuk melayani masyarakat," ucap Agung.

Tentu dari nilai kerapiannya tidak baik, karena itu dia mengeluarkan Perwako setiap Hari Kamis baik ASN maupun non ASN menggunakan outer Melayu beserta songket.

Kemudian yang kedua, penggunaan outer bertujuan untuk melestarikan budaya Melayu di Kota Pekanbaru yang diwujudkan dengan penggunaan outer dan tanjak.

"Nantinya setiap Hari Kamis, pagi tetap olahraga, pakai kaos, setelah itu kita menggunakan outer sehingga keadaan pegawai di Pemko Pekanbaru tetap rapi dan tetap berbudaya," ujarnya.

"Jadi, kita ingin menonjolkan simbol-simbol kemelayuan di tengah lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan nanti mungkin kita terapkan juga ke pelayanan-pelayanan publik maupun di mal dan rumah sakit," tambah Agung.

Tidak hanya di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, wali kota juga merencanakan penerapan penggunaan outer Melayu kepada pegawai mal, hotel, rumah sakit hingga bandara.

"Jadi memang ke depan, baik itu di bandara, mal, rumah sakit, hotel, kita akan membuat kebersamaan, kesamaan, sehingga mereka tau nuansa Kota Pekanbaru ini seperti ada acara setiap Hari Kamis," kata wako.

"Cita-citanya (dengan penggunaan outer Melayu) akan memunculkan budaya baru di Kota Pekanbaru yang tidak menghilangkan kenyamanan mereka (pegawai) ketika bekerja. Karena ini bisa untuk pakaian di dalam ruangan maupun di lapangan," tutupnya.

Kebijakan Wali Kota Agung Nugroho disambut positif oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Pekanbaru. Langkah ini dinilai bukan sekadar aturan berpakaian, melainkan wujud nyata kecintaan wali kota dalam menjaga identitas dan warisan budaya Melayu di Kota Bertuah.

Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Kota Pekanbaru, Datuk Seri Muspidauan menyampaikan apresiasi atas kebijakan tersebut.

"Kita Lembaga Adat Kota Pekanbaru tentu mendukung 100 persen kebijakan Datuk Bandar Setia Amanah," kata Datuk Seri Muspidauan.

Menurutnya, penggunaan outer melayu di lingkungan Pemko menjadi simbol penghormatan terhadap kearifan lokal sekaligus memperkuat karakter budaya masyarakat Pekanbaru.

"Ini tentu bertujuan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan budaya melayu di Pemko Pekanbaru, salah satunya lewat pemakaian baju Melayu," ujarnya.

Muspidauan menilai langkah Agung Nugroho patut dicontoh karena mampu menghadirkan kebijakan modern yang tetap berpijak pada akar budaya daerah.

"Ke depan kita berharap Wali Kota juga bisa menerapkan penggunaan bahasa Melayu di lingkungan kantor, agar semakin kental nuansa budaya yang diwariskan leluhur," imbuhnya. *



DUKUNGAN LAMR - Ketua DPH LAMR Kota Pekanbaru, Datuk Seri Muspidauan mendukung program busana Melayu.



BUSANA MELAYU - Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar tampil dengan outer busana Melayu.



SETIAP KAMIS - Kebijakan berbusana Melayu diterapkan di lingkungan Pemko Pekanbaru setiap Hari Kamis.

Pembangunan Sesuai Kebutuhan Warga



SILATURAHMI - Wali Kota Agung Nugroho silaturahmi bersama ketua RT dan RW se-Kota Pekanbaru dalam momen Ramadan.

Pemko Pekanbaru Realisasikan Program Rp 100 Juta per RW

PEMERINTAH Kota Pekanbaru memulai pelaksanaan Program Pembangunan Rp 100 Juta per RW di seluruh kelurahan. Sebagai langkah awal, camat dan lurah mengundang seluruh ketua RW untuk bermusyawarah menentukan program prioritas yang paling dibutuhkan warga di wilayah masing-masing.

Musyawarah ini menjadi wujud nyata penerapan perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up planning), sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Agung Nugroho. Program ini merupakan janji pembangunan yang kini mulai diwujudkan secara bertahap di seluruh lingkungan RW.

Dalam forum tersebut, ketua RW diberikan kebebasan menentukan kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Usulan yang muncul tetap mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota. Berbagai ide dan masukan mengalir dari peserta. Mulai dari perbaikan jalan lingkungan, peningkatan drainase, pembangunan fasilitas sosial dan ruang terbuka, penyediaan sarana pendukung kenyamanan warga. Wali Kota Agung Nugroho menegaskan, program Rp 100 juta per RW bukan sekadar pembagian anggaran, tetapi langkah strategis untuk mendekatkan pembangunan kepada masyarakat.

"RW adalah pihak yang paling memahami kebutuhan di wilayahnya. Karena itu, pembangunan melalui program ini harus ditentukan langsung oleh warga," ujar Agung.

Selanjutnya, hasil musyawarah di setiap kelurahan akan disampaikan secara berjenjang dari RW ke lurah dan camat untuk diverifikasi. Usulan yang dinilai layak akan diajukan sebagai paket pembangunan yang akan dikerjakan Pemko Pekanbaru.

Pemko menargetkan proses penetapan program prioritas selesai sebelum akhir tahun, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dimulai awal tahun depan. Dengan begitu, manfaat program ini diharapkan segera dirasakan masyarakat di seluruh RW di Kota Pekanbaru.

Wali Kota Agung Nugroho mengatakan setiap daerah di Pekanbaru memiliki RW. Sehingga tidak ada lagi perbedaan atau prioritas khusus terhadap RW tertentu tidak ada lagi pengusulan program pembangunan di tingkat kelurahan. "Program Rp 100 juta per RW tetap berbasis RW. Karena tidak ada wilayah yang tidak memiliki RW. Artinya, seluruh RW memiliki hak yang sama untuk mengusulkan pembangunan," kata wako.

Menurutnya, besaran anggaran Rp 100 juta bukan angka yang bersifat kaku. Angka Rp 100 juta menjadi dasar perencanaan menentukan kebutuhan paling



PEMBEKALAN TIM - Pemko Pekanbaru memberikan pembekalan kepada tim uji kelayakan calon ketua RT dan RW.

utama dan mendesak di masing-masing lingkungan.

"Rp 100 juta ini bukan sekadar soal nominal. Tetapi bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk hal yang paling penting dan paling dibutuhkan oleh masyarakat," jelas Agung.

Namun, kondisi di lapangan kerap menunjukkan kebutuhan pembangunan yang melebihi alokasi awal. Dalam beberapa kasus, dana Rp 100 juta hanya mampu membiayai sebagian kecil dari kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

"Oleh karena itu, bisa saja anggarannya nanti bertambah, mulai dari Rp 200 juta bahkan hingga Rp 1 miliar, tergantung pada skala dan urgensinya," ucapnya.

Pemko Pekanbaru akan melakukan kajian terhadap setiap usulan program yang diajukan melalui mekanisme Rp 100 juta per RW untuk menentukan prioritas dan kelayakan pendanaan.

Selain itu, ketua RT dan RW harus aktif untuk menyampaikan pandangan serta masukan dari masyarakat.

"Kami sangat membutuhkan masukan dari RT dan RW. Semua yang disampaikan akan kami catat dan menjadi bahan bagi kami untuk ditindaklanjuti," tambahnya. Program Rp 100 juta per RW yang digagas Pemerintah Kota Pekanbaru salah satu upaya mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat lingkungan masyarakat.

Melalui program ini, setiap RW diberikan kesempatan mengusulkan kegiatan pembangunan yang dinilai menjadi prioritas bagi warganya.



Berita Acara di Tingkat Kelurahan

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyampaikan bahwa usulan tersebut pada prinsipnya dapat dipertimbangkan, terutama apabila program yang diajukan memang bersifat penting dan mendesak bagi masyarakat.

Menurut Markarius, pengajuan usulan nantinya perlu dibuatkan berita acara di tingkat kelurahan agar dapat langsung dimasukkan ke dalam sistem pengusulan program.

"Insya Allah boleh diusulkan. Nanti dibuatkan berita acara di kelurahan supaya bisa langsung di input. Apalagi jika memang sifatnya urgen atau mendesak," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program Rp100 juta per RW yang disampaikan oleh wali kota pada dasarnya bertujuan untuk pemerataan pembangunan di setiap wilayah.

Namun demikian, pemerintah tetap membuka kemungkinan bagi usulan tambahan jika masih ada kebutuhan yang belum terakomodasi. Wawako Markarius menegaskan, apabila usulan kegiatan berkaitan dengan hal yang sangat penting, seperti menyangkut keselamatan masyarakat, maka program tersebut tetap dapat dimasukkan sebagai prioritas.

"Program ini memang untuk pemerataan. Tetapi jika di RW tertentu masih ada kebutuhan yang belum terakomodasi dan sifatnya sangat mendesak, apalagi menyangkut keselamatan warga, tentu akan kita masukkan," imbuhnya. ***



TAMPUNG ASPIRASI - Musrenbang kecamatan ajang menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.



BIBIT IKAN - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM bersama Forkopimda melepas bibit ikan menuju kemandirian pangan sektor perikanan.

Fasilitasi Petani KUR Tanpa Bunga

Pemko Pekanbaru Dukung Ketahanan Pangan Nasional

PEMERINTAH Kota Pekanbaru berkomitmen mendukung program ketahanan pangan Nasional. Untuk itu, pemko menyediakan lahan pertanian produktif. Selain membantu mewujudkan kemandirian pangan, program ini juga memberikan manfaat langsung kepada para petani.

Pemko Pekanbaru menargetkan lahan seluas 450 hektare untuk ditanami komoditas seperti jagung pipil dan padi. Program tersebut akan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan warga untuk melakukan penanaman di rumah, lingkungan tempat tinggal, dan kantor masing-masing guna mendukung gerakan penghijauan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho berharap program ini dapat memakmurkan petani. Dan menjadi cadangan pangan daerah, agar tidak lagi bergantung pada impor dari negara lain. Pemko akan memfasilitasi petani melalui kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah untuk penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga. Petani yang tergabung dalam program ini tidak perlu khawatir soal jaminan atau sertifikat tanah. Karena Pemko siap memberikan jaminan sesuai dengan luas lahan yang tersedia.

"Kami akan memantau, memberikan pelatihan, serta menyalurkan bantuan berupa alat pertanian dan pupuk. Seluruh hasil pertanian nantinya akan dikelola langsung oleh petani, termasuk pembeli yang sudah tersedia. Ini murni untuk kesejahteraan mereka," jelas wali kota.

Ia mengatakan, lahan yang digunakan tersebut terletak di belakang Kompleks Perkantoran Tenayan Raya. Program ini sedang dalam tahap konsolidasi. "Agar, program ini dapat berjalan lancar tanpa kendala. Kami berharap penanaman jagung ini," katanya.

Agar program ini dapat segera dimulai dan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, saat ini pemko terus melakukan konsolidasi agar tidak ada hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan panen.

Ketahanan dan kemandirian pangan harus tetap dijaga. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga pertahanan dan keamanan Nasional.



BERBASIS SEKOLAH - Wali kota Pekanbaru, Agung Nugroho Bersama siswa dalam giat Pencanangan Program Swasembada Pangan Berbasis Sekolah.

"Kami tentu berharap ketahanan pangan melalui swasembada dapat menjadi pilar pertahanan bangsa. Dengan kemandirian pangan, kita tidak lagi bergantung pada negara lain," beber Wali Kota Agung Nugroho.

Ia menilai masyarakat seharusnya mampu memproduksi apa yang dikonsumsi, dan sebaliknya, mengonsumsi apa yang diproduksi. Dengan begitu, perputaran ekonomi akan terjadi secara mandiri di dalam negeri.

"Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi juga soal kesehatan dan keberlanjutan. Jika kita bisa mengkonsumsi hasil dari tanah kita sendiri, maka kita akan lebih sehat, dan ekonomi akan berputar di antara kita," jelasnya.

Agung menegaskan komitmen dalam mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto mewujudkan kemandirian pangan Nasional. Ia berharap langkah ini menjadi gerakan bersama untuk membangun ketangguhan bangsa dari sektor paling mendasar, yaitu pangan. *



PETERNAKAN AYAM - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM dan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melihat peternakan ayam petelur.





SWASEMBADA PANGAN - Wali Kota Agung Nugroho bersama Dirjen Otda Kemendagri dalam acara pencanangan Program Swasembada Pangan Berbasis Sekolah di SMPN 8 Pekanbaru.

TPP dan THR ASN Pemko Pekanbaru Dicairkan Jelang Idul Fitri



APEL BERSAMA - Wali Kota Agung Nugroho apel bersama ASN, PPPK dan THL di Lapangan Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Wali Kota: Jangan Lupa Bayar Zakat

APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru bergembira setelah Wali Kota H Agung Nugroho mengeluarkan instruksi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Hari Raya (THR) dipercepat sebelum Idul Fitri 1447 H.

Wali Kota Agung Nugroho yang berada di Tanah Suci Makkah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah masih sempat memikirkan sebelum mengambil keputusan pencairan TPP dan THR ASN.

"Setelah saya mendapat masukan dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kemudian saya juga mencermati situasi terkini, maka saya memutuskan agar TPP dan THR ASN agar segera dibayarkan menjelang Idul Fitri ini," ujar Wako Agung.

Wali kota menyebutkan, Pemko Pekanbaru menyadari bahwa pada saat bulan Ramadan dan liburan Idul Fitri, mobilitas dan tingkat konsumsi masyarakat akan sangat tinggi.

Hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar TPP dan THR ASN di seluruh daerah bisa dicairkan.

Ia berharap dengan adanya kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 di tahun 2025 dapat meningkatkan daya beli dan mendukung perekonomian.

"Mudah-mudahan bisa meningkatkan daya beli, dan menguatkan perekonomian Kota Pekanbaru. Bagi yang beragama Islam, ingat jangan lupa bayar zakat fitrah," pesannya.

Wali Kota Agung Nugroho menyampaikan bahwa tidak hanya TPP dan THR yang dicairkan, gaji bulan Maret dan dan TPP ke-13 juga turut dicairkan.

Dengan demikian, pada bulan Ramadan ini para ASN dan PPPK di lingkungan Pemko Pekanbaru menerima dua gaji dan dua TPP sekaligus. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaga kesejahteraan aparatur sekaligus meningkatkan semangat kerja menjelang Hari Raya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas kebijakan yang memberikan perhatian terhadap kesejahteraan aparatur negara.

Selain meningkatkan kesejahteraan ASN, wali kota menilai kebijakan tersebut diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah, terutama selama bulan Ramadan.

Wako Agung mengingatkan agar tambahan penghasilan tersebut dimanfaatkan dengan baik. Ia mengajak para ASN untuk bersyukur dengan menunaikan zakat fitrah, zakat mal, serta memperbanyak sedekah di bulan Ramadan.

Dengan gaya khasnya yang dekat dengan masyarakat, Agung menyampaikan pesan kepada para pegawai agar turut membantu menggerakkan ekonomi lokal.

"Saya mengajak seluruh ASN Kota Pekanbaru, setelah menerima haknya bulan ini, bawa keluarganya makan di restoran-restoran yang ada di kota kita," katanya.

Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat membantu pelaku usaha, UMKM, dan restoran di Pekanbaru agar ikut merasakan berkah Ramadan.

Ia berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pegawai, tetapi juga menghadirkan Ramadan yang lebih bahagia bagi keluarga ASN sekaligus menggerakkan perekonomian Kota Pekanbaru. "Ramadan adalah bulan berbagi. Bahagiakan keluarga, bantu sesama, dan mari kita hidupkan ekonomi kota kita bersama-sama," tutupnya. *



THR CAIR - ASN Pemko Pekanbaru dapat bergembira menyambut Idul Fitri 1447 H menyusul dicairkan TPP dan THR sekaligus.



GERAKKAN EKONOMI - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho berharap THR dan TPP ASN dapat menggerakkan perekonomian lokal.



TINGKATKAN KINERJA - Wali Kota Agung Nugroho mengingatkan ASN meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.



DESAIN KOTA - Pemko Pekanbaru akan membangun bundaran di depan Mall Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman lebih tertata dan estetik.